



70 TAHUN
ISEI
IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA

MEMBANGUN EKONOMI NEGERI



MEMBANGUN EKONOMI NEGERI

MEMBANGUN **EKONOMI NEGERI**

70 TAHUN

IKATAN SARJANA EKONOMI INDONESIA

1955–2025

Membangun Ekonomi Negeri
70 Tahun Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
1955–2025

Copyright © Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Penanggung Jawab
Yoga Affandi

Koordinator Penulisan
Donni Fajar Anugrah

Penulis/Editor
Kasjanto Sastrodinomo

Kontributor
Yoga Affandi, Donni Fajar Anugrah,
Rita Krisdiana, Mirza Ardi Wibawa

Desainer/Tata Artistik
Iwan Gunawan, Indah Tjahjaulan

Kulit Muka
Iwan Gunawan

Keterangan gambar kulit muka buku:
Atas - Foto senyum anak-anak sekolah dan sekitaran
Bundaran Hotel Indonesia menghadap Tugu Monas
sekitar tahun 1963 (sumber: KITLV)
Bawah - Foto senyum anak-anak dan Kereta MRT di
sebuah stasiun, menuju Bundaran Hotel Indonesia
(sumber: Poxel by Alba)
Mencitrakan makna lintasan masa membangun ekonomi
negeri, tidak hanya infrastruktur, namun juga beriringan
dengan pembangunan sumber daya manusia.

Penerbit
Pengurus Pusat Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
Jalan Daksa IV/9, Kebayoran Baru
Jakarta 12110

Katalog Data Terbitan Perpustakaan Nasional
ISBN



SAMBUTAN

Perry Warjiyo | **vi**

PENGANTAR

Emil Salim | **viii**

PROLOG

Secangkir Kopi | **x**



LAJU SEBUAH WAHANA

Konteks History | **2**

Deklarasi ISEI | **7**

Komitmen, Visi dan Misi | **11**

Struktur Besar | **15**

Kantor Cabang | **20**



SANG PENEROKA

Tanggung Jawab Intelektual | **27**

Sosok Pelopor | **32**



SKETSA SETENGAH ABAD PERTAMA

Tantangan Masa Awal | **42**

Tatanan Baru | **49**

Melintas Transisi | **63**



MEMBUKA RUANG BAGI RAKYAT

Memberdayakan 'Si Kecil' | **81**

Suara-suara dari Kongres | **85**



MENINGKATKAN PERAN ORGANISASI

Membuka Lebar Forum | **98**

Memperkuat Produktivitas | **101**



MENITI ARUS GLOBALISASI

Karier dan Reputasi | **110**

Melangkah ke Depan | **113**

Kongres di Tengah Pandemi | **117**

Memimpin Kembali | **121**



HOME SWEET HOME

Home Sweet Home | **125**

SAMBUTAN

Perry Warjiyo

Ketua Umum ISEI 2018 - 2027



Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Rasa bangga dan apresiasi saya kepada Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) atas kiprahnya yang telah tumbuh selama 70 tahun sebagai wadah intelektual bagi para ekonom dan sarjana ekonomi di seluruh Indonesia. ISEI lahir dengan visi berkontribusi bagi kemajuan ekonomi nasional dengan penguatan sinergi bersama pengampu kebijakan di pusat dan daerah. Seiring dengan perjalanan waktu, peran dan kontribusi ISEI terus berkembang menjawab tantangan zaman, namun tetap teguh pada pengembangan kualitas akademis, riset dan profesionalisme, serta peningkatan kerja sama di tingkat nasional maupun internasional.

Peran sejarah yang dijalankan oleh ISEI tidak hanya tercermin dari kontribusinya dalam merumuskan kebijakan publik dan memberikan masukan kepada Pemerintah, tetapi juga melalui dedikasi anggotanya dalam meningkatkan kualitas wacana ekonomi di tanah air. Berbagai gagasan yang dihasilkan melalui diskusi, publikasi, dan seminar telah membuka ruang berpikir, melahirkan berbagai strategi kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Anggota ISEI yang kini meliputi kalangan Akademisi, Bisnis, dan *Government* (ABG) memiliki peran yang semakin luas untuk menyatukan semangat dan terus berinovasi demi masa depan ekonomi Indonesia yang lebih baik.

Melalui komitmen dan semangat kebersamaan, ISEI telah berhasil menjadi salah satu pilar penting dalam ekonomi Indonesia. Buku *Membangun Ekonomi Negeri: 70 Tahun Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia* diharapkan mampu menjadi jendela yang merefleksi semangat pendahulu untuk inspirasi generasi saat ini dan masa depan. Semoga perjalanan panjang ini dapat terus mengilhami kita semua untuk bekerja dengan dedikasi tinggi dan ketulusan dalam mendorong pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

Perry Warjiyo

PENGANTAR

Prof. Emil Salim, S.E., M.A., Ph.D.

**Menteri Negara Pengawasan
Pembangunan dan Lingkungan
Hidup 1983-1993**

**Ketua Dewan Pertimbangan
Presiden Bidang Ekonomi dan
Lingkungan Hidup 2010-2014**



Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang saat ini berusia 70 tahun, telah menempuh perjalanan panjang dan melewati berbagai tantangan. Sebagai organisasi profesi dengan landasan intelektual, ISEI hampir sebaya dengan kelahiran ekonomi rasional yang ditandai berdirinya Fakultas Ekonomi di Universitas Indonesia (1952). Dalam suasana kelangkaan profesi sarjana ekonomi di tanah air pada tahun 1950-an, Prof. Sumitro Djojohadikusumo merasa perlu membentuk orientasi ekonomi pembangunan di samping pendidikan formal. Tujuannya adalah membawa rasionalitas sarjana ekonomi agar tidak hanya diwacanakan di ruang kuliah, namun juga hadir ke tengah realitas masyarakat. Organisasi ini tumbuh menjawab tantangan pembangunan Indonesia ke depan, baik dalam menjemput peluang atau menghadapi krisis.

Komunikasi yang efektif menjadi kunci dalam merespons krisis di masa mendatang, tidak hanya krisis ekonomi, melainkan juga iklim. Informasi yang disampaikan harus mampu memotivasi masyarakat untuk bertindak, meningkatkan kesadaran, dan mendorong langkah nyata dalam menghadapi ancaman perubahan iklim. Penyampaian informasi yang akurat dapat membangun kesadaran publik, mendorong tindakan nyata, dan menciptakan sinergi antara pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan seluruh elemen bangsa. Dengan begitu, komitmen dan tanggung jawab bersama menjadi elemen penting dalam menghadapi tantangan ekonomi dan perubahan iklim. Komitmen bersama ini akan memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tidak hanya efektif dalam jangka pendek, tetapi juga berkelanjutan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi bumi dan manusianya.

Buku *70 Tahun ISEI Membangun Ekonomi Negeri* menjadi seikat kenangan yang dituai dengan gerak zaman; dalam potret dan kolase cerita sejarah keorganisasian ISEI yang diimbuh nuansa pembangunan ekonomi bangsa Indonesia. Dari buku ini, selama tahun 1955 hingga 2025, membuktikan ISEI bisa tetap tegak dan hidup sebagai organisasi yang bermartabat serta berjuang bagi kemaslahatan bangsa. Semoga garis perjuangan berkaratker ini tetap ditegakkan sepanjang usia hidup ISEI.

Jakarta, 30 Desember 2024

Emil Salim

PROLOG

Secangkir Kopi



Memperingati usia setengah abad Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, Pengurus Pusat di Jakarta menerbitkan buku *ISEI: The First 50 Years*, ditulis oleh Vidya Dahlan dan Lukman Hakim. Buku itu memuat rekaman kesaksian dan pengalaman sepuluh pakar ekonomi yang pernah memimpin ISEI Pusat sejak himpunan itu didirikan pada 1955 hingga 2005. Sepenuhnya buku itu ditulis dalam bahasa Inggris disertai foto-foto para pemimpin ISEI, tokoh ekonomi dan pemimpin nasional serta pelbagai event yang berkaitan dengan kiprah ISEI.

Buku yang kini di hadapan pembaca merupakan lanjutan dari buku tersebut yang ditulis untuk menyambut 70 tahun ISEI pada 2025. Agar selaras, buku ini mengikuti model sebelumnya, dikemas dalam bentuk *coffee table book* alias ‘buku meja kopi’ yang ditulis ringkas, ringan, dan lentur. Juga disertai cukup banyak foto dan ilustrasi yang menjadi ciri buku meja kopi. Namun, berbeda dari buku sebelumnya, penerbitan kali ini sepenuhnya ditulis dalam bahasa Indonesia.

Awalnya, isi buku ini dirancang sebagai risalah singkat organisasi ISEI dengan titik fokus pada latar belakang pembentukan, pertumbuhan dan perkembangannya hingga kini. Bisa juga dilihat sebagai genre tulisan populer tentang wahana atau “rumah besar” tempat ekonom Indonesia berhimpun. Tujuannya menyajikan informasi ringkas-padat kisah himpunan itu, yang bisa dibaca sambil meneguk kopi hangat di beranda kafe, di ruang tunggu tamu kantor, atau di mana pun buku ini tersua pembaca.

Namun, tidak selalu mudah mengisi ragangan penulisan tersebut. Sebabnya ialah karena langkanya sumber tertulis - terutama kategori primer - atau dokumen resmi yang mencatat segenap aspek perkembangan kelembagaan ISEI dari waktu ke waktu. Benar, ISEI Pusat telah mencetak dan menerbitkan banyak buku, prosiding kongres dan sidang pleno, jurnal ilmiah, dan sebagainya. Akan tetapi catatan terperinci tentang perkembangan “infrastruktur” organisasi itu dari waktu ke waktu, terutama pada masa-masa awal—terasa agak rumpang.

Walhasil, buku ini belum mencerminkan rekonstruksi morfologi kelembagaan ISEI secara utuh. Jalan keluar yang diambil di sini ialah menelusuri suatu konteks historis yang, langsung-tak-langsung, dipandang bertautan dengan proses kelahiran himpunan itu, serta memaknai arti penting kehadirannya dalam perkembangan sosial pada umumnya di tanah air. Arah tulisan ini bisa memberi gambaran kelembagaan ISEI sewajarnya.



Sebagian isi buku meja kopi ini dimodifikasi dari *First 50 Years* dengan menarasikan kembali bab tentang Sumitro Djojohadikusumo menjadi biografi atau riwayat singkat hingga ia mendirikan ISEI (Bab 2). Pertimbangannya sebagai apresiasi kepada begawan ekonomi yang telah meneroka atau memelopori pembentukan ISEI, dan meletakkan dasar-dasar ilmu ekonomi pembangunan.

Sebelum itu, Bab 1 buku ini berisi deskripsi garis besar pembentukan ISEI pada 1955. Pemberian proses pembentukan ISEI dalam bab ini bukanlah rekonstruksi “sejarah lengkap” organisasi tersebut. Berdasar sumber yang berhasil diperoleh, isi bab ini lebih merupakan fragmen tentang latar belakang atau konteks historis yang dipandang relevan hingga ISEI dideklarasikan dan beberapa aspek perkembangannya kemudian.

Substansi pokok Bab 3 dikemas ulang dari *First 50 Years*. Bab ini mengambil ruang agak banyak karena menyangkut profil sepuluh ketua umum ISEI pada setengah abad pertama umur organisasi itu. Fungsinya sebagai jembatan pengingat tentang episode limapuluh tahun pertama ISEI. Agar tidak sekadar mengulang, dalam bab ini sedapat mungkin diberi narasi tambahan dan foto atau ilustrasi pendukung.

Kemudian Bab 4 hingga Bab 6 buku ini kembali mengambil model *First 50 Years*. Peran dan pengalaman tiga ketua umum ISEI Pusat setelah setengah abad pertama, yaitu Darmin Nasution, Muliaman D. Hadad, dan Perry Warjiyo, dinarasikan secara individual serupa dengan sepuluh ketua umum sebelumnya. Dalam narasi tentang tiga ketua umum terakhir itu ditambahkan wacana dan isu perekonomian yang disarikan dari Sidang Pleno dan Kongres yang merupakan agenda rutin ISEI. Khazanah foto diri, *event* dan ilustrasi tetap disertakan seperti pada bab-bab sebelumnya.

Pada bagian terakhir, Bab 7, ditambahkan kisah tentang kantor Sekretariat ISEI Pusat di Jakarta dan pengelola sehari-hari kantor tersebut. Penambahan bab baru ini dipandang penting karena kantor ISEI Pusat menyimpan cerita sendiri. Hanya sedikit organisasi profesi keilmuan yang mampu memiliki kantor permanen. Selain itu, buku ini juga dinazarkan menampilkan subjek cerita selengkap mungkin.



Sumber penulisan buku ini dikumpulkan dari berbagai literatur baik tentang ISEI maupun [ilmu] ekonomi dan rujukan lain. Surat kabar atau media massa merupakan salah satu sumber primer yang amat berharga meski tidak banyak yang bisa digali terkait dengan riwayat organisasi ISEI. Foto-foto para pemimpin ISEI yang ditampilkan dalam buku ini diambil dari berbagai kesempatan, baik di dalam maupun di luar kegiatan ISEI. Wawancara dengan mantan ketua umum bisa menjadi sumber primer lain yang bermakna. Namun, kendalanya, hampir seluruh mantan ketua terwawancara telah memasuki usia sepuh (tertua Emil Salim, 93 tahun) sehingga banyak hal yang terlupa dan tak terungkap.

Penghargaan dan terima kasih diaturkan kepada beberapa eks-Ketua Umum ISEI, yang telah meluangkan waktu untuk kami wawancarai. Walau dalam kesempatan dan situasi terbatas, pandangan para ahli tersebut telah membuka wawasan penyusun.

Prakarsa penerbitan buku ini langsung dari Pengurus Pusat ISEI. Inisiatif ini mencerminkan kesadaran tentang arti penting mencatat pengalaman dan kenyataan masa lalu sebagai medium belajar demi hari depan. Penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada Bapak Perry Warjiyo, Ketua Umum ISEI, saat ini juga merupakan Gubernur Bank Indonesia, atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada tim penyusun guna mewujudkan buku ini.





LAJU SEBUAH WAHANA

Kronik awal Ikatan Sarjana
Ekonomi Indonesia. Sebuah
rumah besar bagi para
cendekiawan ekonomi.

Awalnya, organisasi profesi para ekonom ini bernama Ikatan Sarjana Ekonomi, tanpa keterangan 'Indonesia' di belakang nama itu. Barulah pada Kongres 1964 di Jakarta, identitas keindonesiaan itu resmi disematkan sehingga berubah menjadi Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia disingkat ISEI hingga kini. Dengan nama lengkap itu, ISEI menegaskan diri sebagai organisasi berskala nasional. Bahkan, dilihat dari dedah kiprahnya, menjangkau level global.

Dipandang dari denyut perkembangan sosio-budaya bangsa, kelahiran organisasi profesi keilmuan bisa dilihat sebagai *conditio sine qua non*, syarat tak terhindarkan, bagi kemajuan komunitas profesi itu sendiri dan, lebih jauh, bagi kemajuan bangsa. Organisasi profesi keilmuan menjadi wahana, wadah, atau kendaraan bagi para bestari menjalin relasi sosial antarsesamanya untuk memumpun gagasan dan

melancarkan kerja-kerja kreatif yang bermakna luas bagi bangsa dan negara.

Umumnya organisasi, termasuk organisasi profesi, di negara-negara "terbelakang" dibangun oleh golongan elite khususnya kelompok terpelajar berpendidikan modern. Di sini terlihat bahwa kelompok intelektual terpanggil oleh tuntutan zaman. Itu sebabnya, kaum muda sering dikatakan sebagai motor penggerak modernisasi pada masyarakat "pasca-tradisional" yang ditandai oleh kesadaran dan hasrat membebaskan bangsa dari penjajahan serta meninggikan martabat, dan meningkatkan kesejahteraan.

Konteks Historis

Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia didirikan ketika bangsa baru, Indonesia, belum genap



Istimewa

■ Pemuda motor kemerdekaan bangsa. Sekelompok pemuda terpelajar terlibat dialog dengan tokoh senior pergerakan dalam peristiwa Rengasdengklok. Mereka mendiskusikan proses kemerdekaan bangsa Indonesia.

sedasawarsa. Bahkan pada paruh terakhir dekade tersebut, pemerintah Kerajaan Belanda baru bersedia mengakui kedaulatan negara Republik Indonesia melalui Konferensi Meja Bundar yang dihelat di Negeri Belanda pada 1949. Situasi itu melukiskan walaupun Indonesia telah merdeka sebagai negara-bangsa, bahkan dengan jalan revolusioner, ternyata masih harus berjuang keras mengatasi berbagai persoalan pascakolonial.

Dikaitkan dengan tahap pertumbuhan ekonomi model Rostow—dalam *The Stages of Economic Growth* (1960)—kelahiran ISEI, boleh jadi, saat Indonesia berada dalam masa “prasyarat untuk tinggal landas” tengah meretas. Tentu ada

konteks dan aspek yang berbeda antara negara-negara Eropa Barat dan Indonesia mengenai masa prasyarat tinggal landas itu. “Jadwal” tinggal landas negara-negara maju pun niscaya tidak bersamaan dengan masyarakat tradisional di Dunia Ketiga—begitu kemudian biasa disebut.

Di negara-negara Eropa Barat, masa prasyarat untuk tinggal landas mulai terlihat nyata sejak akhir abad ke-17, makin terang pada awal abad berikutnya, dan terus lanjut meluncur. Dalam suasana berancang-ancang itu, tulis Rostow, “buah-buah ilmu pengetahuan modern” mulai diterjemahkan ke dalam fungsi-fungsi [perekonomian] baru secara bersama-sama dalam pertanian dan industri, beriringan



repro buku F. De Haan, Oud Batavia (1935)

dengan perluasan pasar dunia dan persaingan internasional. Jadi, awalan masa tinggal landas di Eropa Barat berjalan seiring dengan merekahnya akal-budi yang mencerahkan peradaban.

Pada abad berikutnya, persentuhan Archipelago dengan Barat semakin intensif dan ekstensif. Kali itu dalam konteks hubungan antara *colonizer* dan *colonized* yang dikendalikan

■ *Suasana Pasar Senen di Batavia. Jika negara-negara Eropa telah mengalami masa prasyarat tinggal landas pada abad ke-17, Kepulauan Nusantara baru memasuki zaman pramodern yang ditandai oleh kedatangan orang Eropa yang berinteraksi dengan penduduk lokal dalam suatu jaringan perdagangan global. Jaringan serupa itu sejatinya telah berkembang sebelum orang Eropa berdatangan di Timur Jauh. Jadi, pasar global sebenarnya sudah terbentuk di Kepulauan Nusantara setidaknya sejak abad ke-14 yang meluas di kawasan Negeri Bawah Angin, julukan untuk Asia Tenggara.*



KITLV

■ Suasana Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Pengakuan kedaulatan atas Indonesia telah diketuk, tapi sejatinya situasi belum benar-benar melegakan. Melalui konferensi itu, Belanda masih menyisakan beberapa masalah seperti Papua yang tidak mereka akui sebagai wilayah negara Republik Indonesia; bentuk negara kesatuan yang dirumuskan para pendiri bangsa "diutak-atik" kembali menjadi negara serikat; dan utang warisan penjajahan juga dibebankan ke pundak Indonesia. Artinya, dalam beberapa aspek fundamental, KMB tidak serta-merta bisa melenyapkan pengaruh politik kolonial dari persada tanah air.

praktis ekonomi pasar dunia sehingga terkesan seolah-olah terjadi penularan virus kemodernan semisal pengenalan uang dalam era Sistem Tanam Paksa. Namun, nyatanya, sektor ekonomi besar seperti perkebunan dan pertambangan tetap dikuasai kepentingan kolonial atau kuasi-kolonial.



KITLV

Sebuah kapal kargo dari Amsterdam bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok (1947). Denyut ekonomi tak boleh berhenti walau masih dalam suasana revolusi.

Ancang-ancang persiapan menuju prasyarat lepas landas sempat dikira dimulai pada awal abad ke-20 ketika pemerintah kolonial memperkenalkan Politik Etis yang bertujuan menyejahterakan kehidupan masyarakat terjajah. Kala itu pemerintah kolonial mulai membuka balai pendidikan tinggi untuk menyemai "buah-buah ilmu pengetahuan modern"; industri dan perkebunan relatif tumbuh kendati terbatas terutama di luar Pulau Jawa. Akan tetapi, nyatanya, politik yang digencarkan kaum etisi itu hanya menyentuh sedikit lapisan masyarakat pribumi dan praktis tidak terjadi perubahan mendasar pada rakyat banyak.

Kalau begitu, apakah masa prasyarat tinggal landas bagi Indonesia baru bermula setelah proklamasi kemerdekaan? Belum sepenuhnya jelas sebab setelah merdeka, perang terhadap kolonialisme Belanda kembali berkobar hingga setengah dasawarsa kemudian. Selama perang berkecamuk, kegiatan produksi, perdagangan dan kegiatan ekonomi pada umumnya terganggu. Aktivitas ekspor-impor terhenti; terjadi kerusakan luar biasa pada aset produktif dan infrastruktur. Perang kolonial itu jelas mengacaukan banyak potensi dan peluang membangun bagi Indonesia.

Logo awal ISEI. Menggambarkan seikat padi, lambang kemakmuran dan potensi besar perekonomian Indonesia. Seikat padi bisa pula dimaknai sebagai simbol persatuan di antara unsur-unsur dalam organisasi. Kemungkinan logo ini dibuat seiring dengan berdirinya ISEI pada 1955. Tidak ditemukan dokumen tentang siapa pencipta logo ini.



Repro: *Ekonomi* (1959).

Deklarasi ISEI

Dideklarasikan oleh Sumitro Djojohadikusumo pada 14 Januari 1955, ISEI tercatat sebagai organisasi profesi keilmuan sosial pertama di Indonesia yang didirikan sejak awal kemerdekaan. Atau, berselang sekitar lima tahun dari saat pembukaan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia—salah satu kampus yang menjadi mata air dari mana anggota ISEI bersumber. Sementara itu, “sepupu” ISEI, yakni Ikatan Akuntan Indonesia, lahir pada 1957, dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia pada 1969.

Kelahiran ISEI bahkan jauh mendahului persalinan organisasi profesi lain yang mewadahi ilmu-ilmu sosial inti, yaitu Asosiasi Ilmu Politik

Indonesia (1985), Ikatan Sosiologi Indonesia (1989), dan Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (2009). Organisasi profesi keilmuan lain yang dipandang bersisian dekat dengan ilmu ekonomi, yakni Asosiasi Antropologi Indonesia, baru dibentuk pada 1983. ISEI juga layak dicatat sebagai perhimpunan profesi ilmu sosial pertama yang “murni” dilahirkan sendiri oleh anak negeri Indonesia—bukan bermetamorfosis dari rahim kolonial.

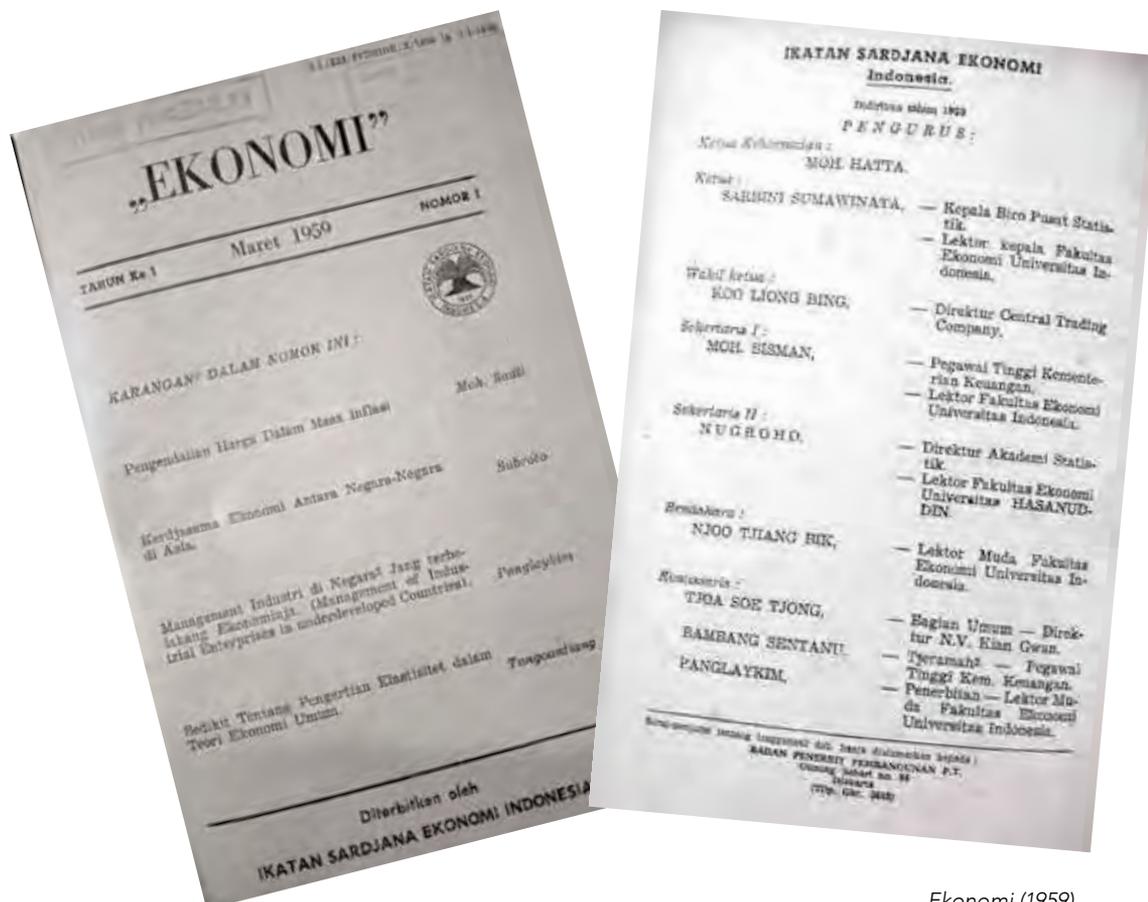
Perkembangan awal ISEI sedikit terkuak dalam majalah *Ekonomi* yang diterbitkan organisasi itu saat dipimpin Sarbini Sumawinata (1957) yang menggantikan Sumitro, pendiri dan ketua pertama. Dalam edisi perdana (Maret 1959)

dicantumkan nama pengurus ISEI periode 1957-64 yang terdiri dari sembilan orang yaitu Mohammad Hatta (Ketua Kehormatan), Sarbini Sumawinata (Ketua), Koo Liong Bing (Wakil Ketua), Mohammad Sisman (Sekretaris I), Nugroho (Sekretaris II), Njoo Tjiang Bik (Bendahara); dan tiga komisaris yang terdiri dari Tjoa Soe Tjong (Bagian Umum), Bambang Sentanu (Ceramah), serta Panglaykim (Penerbitan).

Walau terkesan terbatas lantaran situasi masanya, komposisi pengurus ISEI telah mewakili unsur keberagaman golongan

masyarakat Indonesia. Begitu pula atribusi atau afiliasi para pengurus--yang disertakan dalam daftar nama tersebut--terdiri dari berbagai kalangan profesi, yakni akademisi, birokrat pemerintahan dan pengusaha. Latar belakang keberagaman profesi para pengurus tersebut menjadi elemen dasar keanggotaan ISEI secara umum hingga kini.

Lepas dari perang fisik, Indonesia pada kurun 1955 memasuki medan juang yang lain. Partai politik bertumbuhan bak jamur diguyur hujan, yang berlanjut ke pemilihan umum pertama sejak kemerdekaan.



Edisi perdana *Ekonomi*. Majalah ini diterbitkan pertama kali pada 1959, diasuh oleh Pang Lay Kim (ketua dewan redaksi), Subroto dan Tangoantiang (anggota dewan redaksi). Kantor redaksi di jalan Lamandau 18, Blok C, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Harga langganan majalah itu adalah Rp35/tahun untuk pegawai kantor swasta dan Rp50/tahun untuk pegawai pemerintah dan mahasiswa.

Ekonomi (1959).



Istimewa

Pemilihan Umum pertama. Setelah Indonesia merdeka pada 1955 diselenggarakan pemilihan umum yang pertama. Pemilihan itu dijuduli sebagai “pemilihan seratus partai” lantaran banyak kubu politik yang bertarung di arena pencoblosan. Walau demikian pemilihan berjalan sangat demokratis bagi negara muda Indonesia kala itu. ISEI lahir dalam suasana praktik demokrasi awal di Indonesia.

Pada masa prelude itu, ISEI kebagian efek politik demokrasi parlementer yang diwarnai kabinet pemerintahan yang rapuh. Tercatat dua kabinet jatuh-bangun yang beriringan dengan perkembangan awal ISEI yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap (bertahan kurang dari satu tahun; Agustus 1955 hingga Maret 1956), dan Kabinet Ali Sastroamidjojo II (berumur setahun; Maret 1956-Maret 1957). Sejauh itu, efek politik tersebut terhadap ISEI secara keseluruhan tampaknya bersifat tidak langsung kendati Sumitro sempat bergabung sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Burhanuddin.

Efek politik langsung yang cukup serius bagi ISEI pada waktu itu ialah mundurnya Sumitro sebagai ketua organisasi pada 1957 karena

keterlibatannya dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia di Sumatera Tengah— suatu gerakan sparatis kaum sosialis (Sumitro tergabung dalam Partai Sosialis Indonesia kala itu) yang meluapkan rasa tak puas terhadap kebijakan pemerintah pusat di Jakarta.

Mengail dalam kisruh, Partai Komunis Indonesia, yang secara ideologi berlawanan terhadap PSI, mendesak Presiden Sukarno untuk membubarkan ISEI. Tapi upaya itu sia-sia.

Mampu bertahan dari guncangan politik pada masa awal perkembangannya, ISEI tetap melaju di tengah situasi pasca-dekolonisasi yang belum sepenuhnya stabil. Kepengurusan pada waktu itu masih sebatas Jakarta. Pengganti Sumitro ialah



KITLV

Suasana merdeka. Sebuah bangunan kolonial dicoracoret setelah kemerdekaan. Terbaca pernyataan, kemerdekaan adalah mahkota setiap bangsa, Indonesia untuk bangsa Indonesia. Tampak sejumlah orang berlalu lalang menikmati alam merdeka.

Sarbini Sumawinata yang belum lama kembali dari studinya di Universitas Harvard, Amerika Serikat, pada 1955. Begitu pula Mohammad Hatta tetap dalam kursi jabatan Ketua Kehormatan. Bahkan posisi itu terus berlanjut hingga beberapa episode kepemimpinan ISEI kemudian—menunjukkan wibawa dan integritas Hatta sebagai “ekonom patriot” senior itu tetap menjadi spirit moral bagi ISEI.

Dilihat dari kepentingan ISEI, majalah Ekonomi—telah disebutkan sebelumnya—menjadi organ urgen bagi organisasi yang masih terbilang belia. Menurut Sarbini, dalam kata pengantar

edisi perdana, majalah itu bermanfaat untuk memperdalam pengetahuan ekonomi dan mempererat kerja sama antaranggota ataupun dengan masyarakat luas. Bahkan, tulisnya lebih lanjut, majalah itu jauh lebih penting untuk mengetahui permasalahan di luar bidang ISEI “agar kita dapat memperkaya dan memperdalam pengetahuan tentang ekonomi Indonesia.”

Juga menyambut edisi perdana Ekonomi, Ketua Kehormatan Mohammad Hatta menulis bahwa majalah itu diterbitkan untuk “memaksa mereka [para anggota ISEI] menyatakan tanggung



Istimewa

■ *Mohammad Hatta sebagai tokoh nasional dan menjadi Ketua Kehormatan ISEI.*

jawabnya terhadap ilmu yang dituntutnya dan terhadap tanah air yang harus dibangun.” Dalam ungkapan yang sugestif, Hatta menegaskan bahwa tanah air yang baru merdeka dan terbelakang dalam segala rupa harus dibangun. Sebagian besar dari pembangunan itu meliputi bidang ekonomi. “Dalam hal ini pendapat mereka yang disebut ahli dalam ekonomi berdasarkan pendidikannya sangat diperlukan,” tulis Hatta.

Komitmen, Visi dan Misi

Membaca preambul atau mukadimah suatu organisasi tak ubahnya membaca ikrar dari pendiri ataupun seluruh anggota organisasi

itu. Ikrar adalah pernyataan kesetiaan pada tujuan yang disepakati dan menjadi komitmen bersama di antara pemangku organisasi yang bersangkutan. Dalam hal ini, ikrar bisa dipandang sebagai komitmen institusional ataupun individu anggotanya.

Dalam preambul statuta ISEI (1990) terbaca ikrar para pendiri ataupun ekonom anggota organisasi itu yang intinya menyatakan tiga hal. Pertama, ekonom Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari masyarakat Indonesia dan oleh karena itu berkewajiban mengambil peran positif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kedua, anggota ISEI dengan penuh tanggung jawab di hadapan

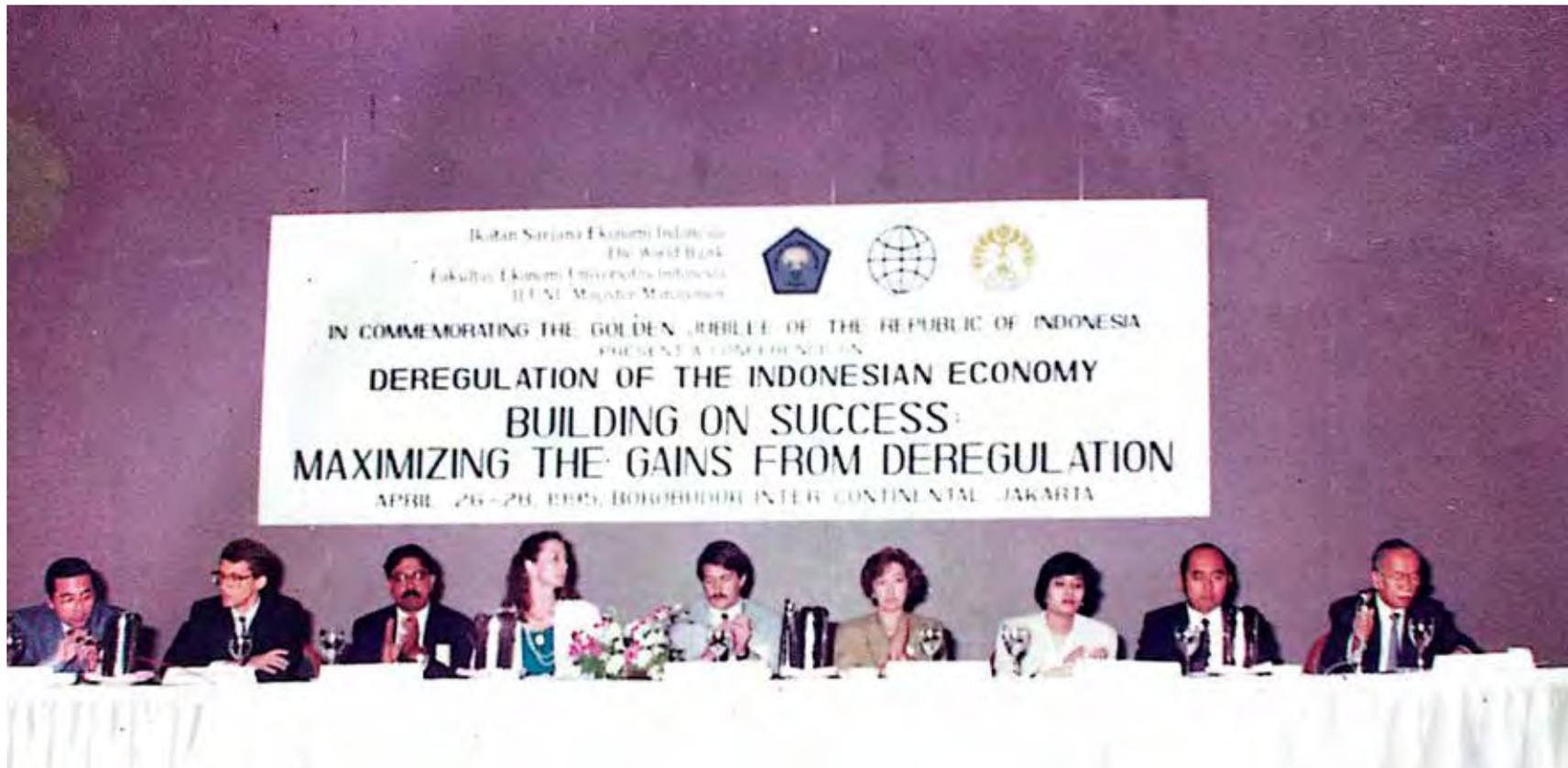
Tuhan Yang Maha Esa akan mengabdikan dirinya bagi pengembangan ilmu ekonomi demi kemajuan bangsa. Ketiga, ekonom Indonesia menghargai setiap aliran pemikiran ekonomi menyempang sesuai dengan ideologi negara Pancasila.

Pada 2019, dilakukan perubahan Anggaran Dasar ISEI untuk menyempurnakan anggaran dasar sebelumnya, termasuk perubahan mukadimah yang memuat empat aspek janji insan konstituennya. Intinya, pertama, ISEI merupakan organisasi yang tepercaya dalam berkontribusi bagi kemajuan perekonomian Indonesia dan kesejahteraan rakyat melalui sinergi antara akademisi, pemangku kebijakan

dan pelaku dunia usaha. Kedua, anggota ISEI berkomitmen mengembangkan ilmu-ilmu ekonomi. Ketiga, anggota ISEI berupaya meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi demi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Keempat, anggota ISEI ikut serta dalam pemikiran dan pembaruan kerja sama perekonomian regional dan global yang tidak bertentangan dengan falsafah bangsa dan negara.

Pada dasarnya, kedua mukadimah (1990 dan 2019) tersebut memiliki *spirit* yang sama yakni semangat membaktikan diri sarjana ekonomi bagi kemajuan ilmu ekonomi, perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Dalam mukadimah

■ Konferensi internasional ISEI (1995) bekerjasama dengan World Bank dan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Membicarakan deregulasi ekonomi Indonesia merupakan kiprah profesional sarjana ekonomi sesuai dengan misi yang diembannya.



Koleksi ISEI Pusat



Koleksi ISEI Pusat

Pelantikan Pengurus Cabang. Ketua Umum Perry Warjiyo melantik pengurus ISEI Cabang Palangkaraya 2022–25.

terakhir ditambahkan dua aspek baru yang memantulkan perkembangan masa kini. Pertama, perluasan cakupan rumpun ilmu-ilmu ekonomi meliputi ilmu ekonomi, manajemen, bisnis dan akuntansi. Kedua, langkah ISEI tidak sekadar di seputar “halaman rumah” sendiri melainkan menembus kancah internasional dengan tetap mengacu pada nilai-nilai nasional.

Mukadimah ISEI merefleksikan cita-cita awal organisasi itu yang hendak membangun paradigma baru ilmu ekonomi pembangunan ataupun pembangunan nasional pada umumnya. Paradigma baru itu dilandasi pola pikir rasionalitas—ungkapan Emil Salim—yang menjadi motor penggerak pembangunan untuk “mengeluarkan tanah air dari perangkap keterbelakangan dan kemiskinan.”

MUKADIMAH



Bahwa kami Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia memiliki visi untuk menjadi organisasi perkumpulan sarjana yang terpercaya dalam memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi Indonesia dan kesejahteraan rakyat melalui penguatan sinergi antara akademisi, pengampu kebijakan baik di pusat maupun daerah, dan pelaku dunia usaha.



Bahwa kami Sarjana Ekonomi Indonesia berkomitmen mengembangkan ilmu ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi yang sejalan dengan asas dan dasar negara Republik Indonesia.



Bahwa kami Sarjana Ekonomi Indonesia berupaya untuk meningkatkan kualitas kebijakan ekonomi di tingkat pusat dan daerah yang dapat diterapkan bagi kemajuan dan kesejahteraan rakyat Indonesia.



Bahwa kami Sarjana Ekonomi Indonesia ikut serta dalam pemikiran dan pembaharuan kerja sama perekonomian regional dan global yang tidak bertentangan dengan falsafah bangsa negara Republik Indonesia.



Koleksi ISEI Pusat

■ *Sidang Pleno ISEI (2023). Pengurus ISEI mengadakan Sidang Pleno sebagai ajang evaluasi dan perumusan program kerja organisasi.*

Sementara itu, visi ISEI dirumuskan sebagai lembaga yang memberikan kontribusi bagi kemajuan ekonomi nasional dengan menguatkan sinergi bersama pengampu kebijakan baik di tingkat pusat maupun daerah. Gagasan pembangunan tidak hanya dikembangkan di tingkat pusat, melainkan bersinergi hingga daerah. Dalam hal ini, ISEI diharapkan bisa menjadi katalisator yang mampu menarik segala potensi daerah ke level nasional. Di sini, visi ini dimaknai sebagai pandangan ke depan yang sejauh-jauhnya dapat dijangkau yang tidak lepas dari amanat

dan cita-cita mulia mencapai masyarakat adil dan makmur.

Misi ISEI menandakan adanya tugas memperkuat aspek ilmu dan ekonomi praktis dalam konteks membangun bangsa dan berkiprah dalam kancah global. Dalam hal ini, keikutsertaan ISEI merumuskan kebijakan ekonomi dilihat sebagai darma keilmuan organisasi, sedangkan pengembangan keilmuan terlihat pada misi meningkatkan mutu akademis, riset dan profesionalisme.

VISI



Menjadi lembaga yang berkontribusi nyata bagi kemajuan ekonomi nasional dengan didukung oleh penguatan sinergi bersama pengampu kebijakan baik di pusat dan daerah.

MISI



Memperkuat peran ISEI dalam perumusan kebijakan ekonomi, pengembangan kualitas akademis, riset dan profesionalisme serta peningkatan kerja sama di tingkat nasional maupun internasional.



Dengan misi itu, ISEI bisa dikatakan mengemban tugas memberdayakan perangkat ilmu pengetahuan seperti halnya dalam institusi pendidikan atau pihak lain yang memperhatikan pada gerak kemajuan.

Tentu, ISEI bukan lembaga pendidikan formal seperti universitas. Namun, dengan misinya, organisasi ini telah bertindak sebagai *agent* modernisasi dan pembangunan. Dalam fungsi agensinya itu, ISEI bertindak layaknya tangki pemikiran di luar mimbar akademik. Dengan posisi itu cukup leluasa bagi ISEI untuk menyemai dan menebarkan “virus” gagasan alternatif, progresif, dan mungkin di luar pemikiran *mainstream* alias arus utama. Pemikiran dalam komunitas ini sangat diperlukan untuk mendukung proses pembangunan ekonomi ataupun pembangunan pada umumnya.

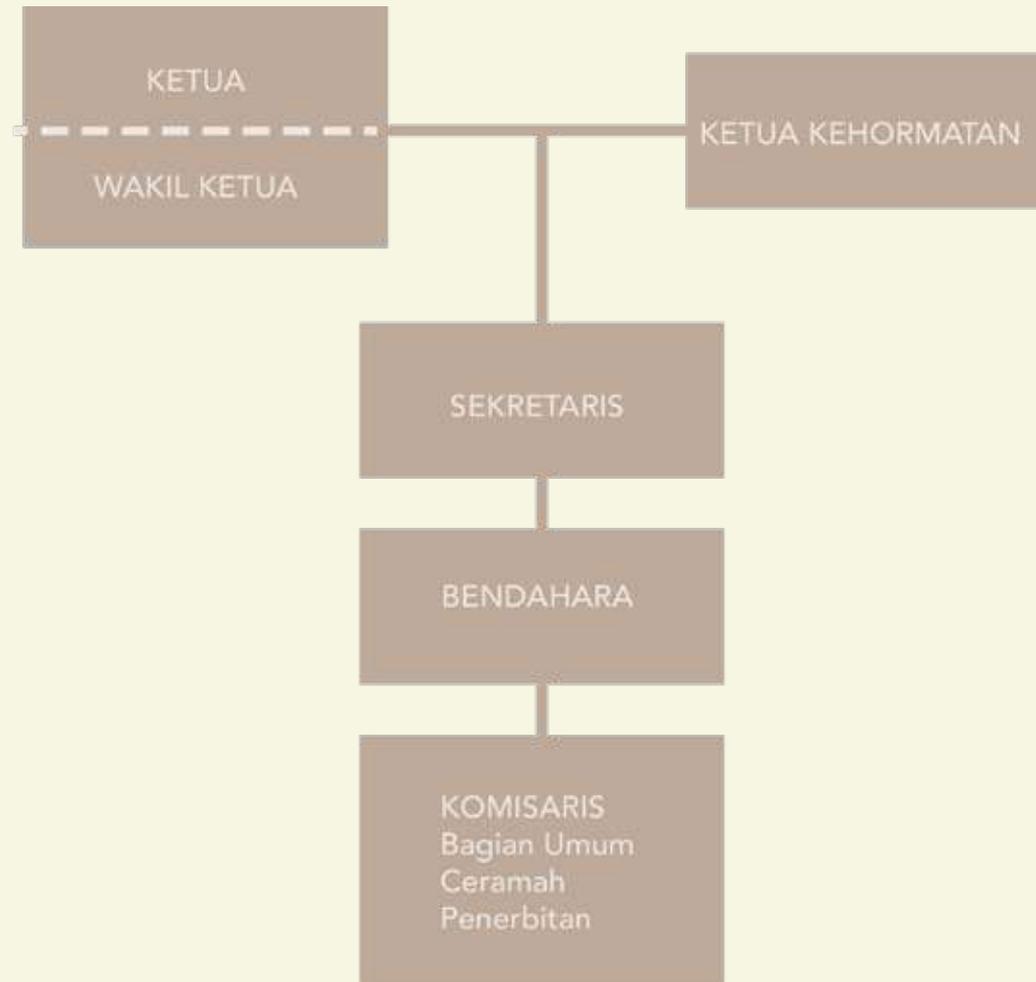
Anggota ISEI, sebagai bagian terpilih dari golongan penduduk Indonesia yang berkesempatan memperoleh pendidikan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri, sangat diharapkan memainkan peran sebagai agen modernisasi dalam masyarakat yang berubah. Sejak beberapa dekade yang lalu, banyak anggota ISEI, baik dalam kedudukannya selaku pengambil keputusan dalam pemerintahan maupun sebagai intelektual bebas, berkontribusi dalam perancangan dan pelaksanaan pembangunan.

Struktur Besar

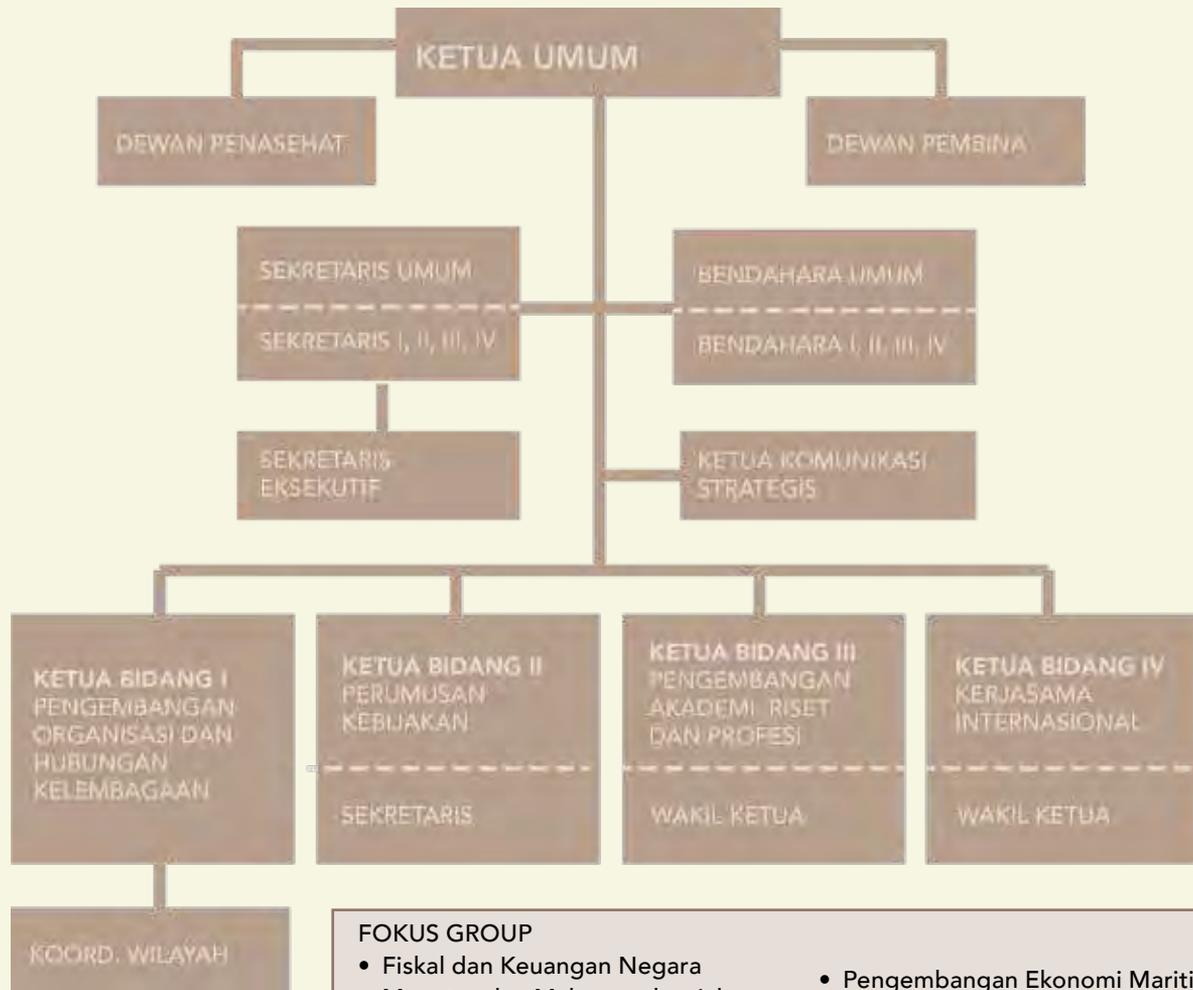
Pada masa awal pertumbuhannya, struktur organisasi dan kepengurusan ISEI terkesan “kurus” dan prasaja. Hanya sembilan orang dari berbagai latar belakang dan pekerjaan (seperti telah disebutkan dalam bab terdahulu) yang mengawaki organisasi tersebut. Sebagai suatu rintisan, struktur dan konfigurasi kepengurusan itu boleh dikata telah menjawab kebutuhan pada masanya.

Kini, struktur dan kepengurusan ISEI mengalami perkembangan sedemikian rupa sehingga perlu skala besar. Pada struktur baru (2022) pada dasarnya memantulkan kebutuhan mutakhir organisasi dalam menanggapi dunia perekonomian yang kian kompleks. Yang menonjol dalam struktur ini ialah detail bidang-bidang yang menjadi perhatian ISEI; begitu pula 15 kelompok terpumpun (*focus group*) sangat siap menyiasati pergerakan zaman yang kian cepat.

Bagan Struktur Organisasi (1959)



Bagan Struktur Organisasi 2022



FOKUS GROUP

- Fiskal dan Keuangan Negara
- Moneter dan Makroprudensial
- Lembaga Jasa Keuangan (Bank, IKNB, Pasar Modal)
- Pendalaman dan Inklusi Keuangan
- Ekonomi dan Keuangan Syariah
- Ketahanan Pangan dan Transformasi Pertanian
- Daya Saing dan Sustainability Ekonomi
- Pengembangan Ekonomi Maritim
- Infrastruktur dan Konektivitas Domestik
- Kependudukan dan Ketenagakerjaan
- Pengembangan Pariwisata
- Pengembangan Industri Kreatif
- Pemberdayaan UMKM dan Koperasi
- E-Commerce dan Fintech
- Perdagangan dan Keuangan Internasional



Koleksi ISEI Pusat

Kantor Cabang

Kali pertama didirikan, ISEI hanya memiliki satu kantor (pusat) di Jakarta. Kantor ISEI pernah berada di Salemba—kemungkinan “menumpang” pada salah satu ruangan di FEUI saat organisasi itu dipimpin Sumitro hingga Emil Salim (1979). Setelah itu pindah ke beberapa lokasi di Jakarta (lihat bab ‘Home Sweet Home’). Anggota ISEI yang berjumlah sekitar 280 orang tersebar di enam kota di Pulau Jawa; hanya enam orang tinggal di luar Pulau Jawa; dan 31 orang di luar negeri—kebanyakan mahasiswa yang belajar di beberapa negara.

Dengan anggota yang menyebar di berbagai kota (di dalam dan di luar negeri) itu, tidak otomatis dibuka kantor cabang. Belum diketahui persis kapan kantor-kantor cabang di daerah mulai dibuka. Diperkirakan baru 1970-an, seiring dengan menguatnya wacana sinergi pusat-daerah dalam pembangunan, pintu-pintu kantor cabang mulai dibuka. Pengurus Pusat mendata jumlah dan sebaran kantor cabang ISEI di Indonesia, yang mencatat terdapat 52 kantor cabang dan dua komisariat berdiri di berbagai kota provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia hingga 2024. Mendatang, jumlah ini dipastikan bertambah sejalan dengan terus berlipatnya (sebaran) lulusan fakultas ekonomi dan tumbuhnya perguruan tinggi ekonomi di daerah.

Kuliah Umum. Profesor Hermanto Siregar, guru besar Institut Pertanian Bogor (kiri) memberi kuliah Kecenderungan Perekonomian Global dan Pentingnya Pengembangan Ekonomi Sirkuler, bersamaan dengan pelantikan pengurus cabang ISEI Padang (2022).

Pelantikan di Banda Aceh dan Surabaya. Ketua Umum Perry Warjiyo melantik pengurus cabang ISEI Banda Aceh tahun 2023 (atas) dan Surabaya tahun 2023 (bawah)



Koleksi ISEI Pusat



Koleksi ISEI Pusat

Sebaran Kantor Cabang





*Data disusun Pengurus Pusat ISEI (2022).





2

SANG PENEROKA

Berawal dari perkreditan rakyat, berlanjut membangun ekonomi negeri. Kiprah Sumitro Djojohadikusumo.



Istimewa

Jauh di negeri seberang, pada awal 1943, Sumitro Djojohadikusumo meraih gelar doktor dari *Nederlandsche Economische Hogeschool*, Rotterdam, Negeri Belanda. Kala itu, pemuda kelahiran Kebumen, Jawa Tengah, tersebut baru berumur dua puluh lima tahun—suatu episode dalam kehidupan manusia yang, menurut pengakuannya sendiri, buah pikirannya “tak dapat tiada mengandung banyak kekurangan dan kelemahan dalam substansinya, apalagi dengan tolok ukur ilmiah.” *Disclaimer* yang ditulis Sumitro pada awal prakata terjemahan disertasinya, *Kredit Rakyat di Masa Depresi* (1989), itu cukup jelas mencerminkan sifat rendah hatinya.

Lahir pada era kolonial, 29 Mei 1917, dan beranjak dewasa saat krisis mengganas, Sumitro adalah saksi sejarah yang melihat langsung perikehidupan rakyat terjajah di negerinya

sendiri dalam tempo cukup panjang. Semasa duduk di sekolah dasar Eropa-Hindia (ELS), ia sering diajak ayahnya berkunjung ke desa-desa di Jawa Tengah dan Jawa Timur dalam rangka bekerja. Ayahnya, Raden Mas Margono Djojohadikusumo, adalah *Inspecteur van het Volkscredietwezen*—kantor ini lalu berubah menjadi *Algemene Volkscredietbank* (AVB); kini Bank Rakyat Indonesia. Ibunya bernama Raden Ayu Siti Katoemi Wirodihardjo. Sang ayah kemudian dikenal sebagai pendiri Bank Negara Indonesia 1946.

Kedudukan sosial dan profesional ayahnya tentu berpengaruh terhadap pilihan jalan hidup dan karier Sumitro di kemudian hari. Itu terlihat pada kemantapannya memilih belajar ekonomi. Sambil kuliah, ia rajin menulis dalam media. Dalam buku semi-dokumenter, *In het land van de overheerser: Indonesiërs in Nederland*

Sumitro Djojohadikusumo (1917–2001). Pendiri dan ketua ISEI yang pertama. Bersama Saroso Wirodihardjo, pamannya dari garis ibu, Sumitro merupakan orang Indonesia pertama yang merengkuh gelar sarjana paripurna ilmu ekonomi di luar negeri sementara negeri sendiri masih dalam jajahan kolonial. Capaian akademisnya menambah deretan kecil golongan terpelajar Indonesia yang mengemuka sebelum Perang Dunia; antara lain Mohammad Hatta yang meraih gelar sarjana ekonomi, juga dari Rotterdam, pada 1932.

Wisuda doktor ekonomi. Sumitro Djojohadikusumo diwisuda (tengah, berbeskap) diwisuda sebagai Doktor Ekonomi di Economische Hoogeschool Rotterdam (11 Maret 1943). Tampak Sukartini (berkebaya), saudara perempuannya, dan Saroso Wirodihardjo, pamannya, dan Tan Goan Po (paling kiri), temannya.



Istimewa

1600-1950, ia tercatat sebagai kontributor majalah Soeara Roepi, terbitan Roekoen Pelajar Indonesia, perkumpulan mahasiswa Indonesia di Belanda (didirikan 1936). Tersebut dalam buku itu, Sumitro bersama Saroso, pamannya, teratur menulis artikel ekonomi, "*vol met cijfers, tabellen en voetnoten*"—penuh dengan angka, tabel dan catatan kaki.

Tanggung Jawab Intelektual

Bukan pula suatu kebetulan apabila Sumitro memilih masalah perkreditan rakyat pada masa depresi sebagai topik disertasinya. Waktu ikut kunjungan dinas ayahnya, ia kerap melihat antrean panjang penduduk desa yang

ingin mendapatkan pinjaman uang di kantor perkreditan. Bukan untuk bergaya konsumtif, kredit itu bagi kaum tani sekadar untuk menambal keperluan hidup mereka sehari-hari. Terlebih ketika paceklik mencekik di musim kemarau dan salah mangsa, kredit membantu sementara mengudat kesulitan subsistensi mereka.

Ditulis dalam bahasa Belanda, disertasi bertajuk *Het Volkscredietwezen in de Depressie* menjadi penanda awal pilihan karier Sumitro sebagai ilmuwan, ekonom profesional, kemudian teknokrat dan pelaku ekonomi. Bahkan, tanpa berlebihan bisa dikatakan bahwa dengan menulis disertasi itu, Sumitro memenuhi tanggung

jawab formalnya sebagai intelektual. Dalam prakata terjemahan disertasinya, ia menulis bahwa pemikiran ekonomi, artinya ekonomi sebagai ilmu, tak lepas dari perkembangan dan keadaan masyarakat yang tengah menghadapi masalah besar pada zamannya.

Pernyataan Sumitro tersebut sangatlah sah manakala ditautkan dengan substansi studinya dan zaman yang pernah ia alami pada masa lampau. Ia dibesarkan dalam suasana krisis global ekonomi yang melanda dunia pada dekade 1930-an. Begitu pula ketika tiba di Negeri Belanda untuk melanjutkan studinya pada 1935, Sumitro tentu ikut merasakan suasana depresif itu di sana. Namun, sejatinya yang lebih menggugah keprihatinannya ialah bahwa mala-ekonomi itu makin menambah beban berat hidup rakyat di negeri sendiri terutama yang tinggal di perdesaan.

Sebagai ilustrasi, gambaran kehidupan rakyat, terutama kaum tani di Pulau Jawa ataupun Hindia Belanda, sepanjang episode kolonial umumnya memang sangat memprihatinkan. Pada awal abad ke-20, Tanah Jawa dihuni sekitar 30 juta jiwa, yang menjadikannya sebagai salah satu kawasan pertanian terpadat di dunia. Ironisnya, sebagian besar penduduknya yang tersebar di desa-desa adalah petani tuna-tanah (tidak memiliki lahan). Banyak petani kehilangan sawahnya lantaran dipaksa menancapkan batang-batang tebu demi pabrik gula yang bermunculan setelah pemerintah kolonial memberlakukan politik Tanam Paksa pada abad sebelumnya.

Harga gula yang merosot di pasar internasional akibat krisis besar sebenarnya justru melegakan petani di Jawa. Mereka berharap bisa "merebut"



Istimewa

kembali sawah miliknya dari pabrik-pabrik gula yang meredup atau bangkrut. Faktanya tentu tidak semudah itu, bahkan dalam banyak kasus terbukti mustahil. Juga terjadi kesulitan dalam pengadaan kebutuhan pangan. Dalam kurun 1930-an, menurut catatan Biro Statistik Pusat pemerintah kolonial (1941), produksi beras per kepala di Pulau Jawa cuma 220 gram, kurang dari separuh kebutuhan normal.

Melalui disertasinya, Sumitro melihat ketimpangan perimbangan kekuatan antara golongan petani produsen di satu pihak dan golongan pelaku ekonomi di lain pihak dalam struktur produksi dan mata rantai perdagangan. Golongan terakhir—pelaku ekonomi—relatif kuat. Akan halnya kedudukan ekonomi petani produsen pada umumnya lemah, sangat dipengaruhi oleh ketimpangan perimbangan tersebut.

■ *Bersama keluarga. Sumitro, berkaca mata, bersama ibunya, Raden Ayu Siti Katoemi Wirodihardjo (duduk, kiri), dan ayahnya Raden Mas Margono Djojohadikusumo (duduk, kanan), serta saudara-saudara kandungnya.*



Istimewa

Ibu dan anak-anak.
Dora Sigar, istri Sumitro
Djojohadikusumo (duduk,
kanan) bersama anak-
anaknya, Bianti Ningsih
Midrawati (berdiri, kiri),
Prabowo Subianto,
Maryani Ekowati, dan
Hasjim Sujono (duduk,
kiri), di Kuala Lumpur
(1963).

Implikasi dari ketimpangan struktural itu petani produsen terpaksa menerima pinjaman dengan harga dan tingkat bunga tinggi, ditambah aneka syarat lain sehingga akhirnya memberatkannya. Akibat lanjutannya, penerima utang terjebak dalam ikatan yang membelenggu dan menjadi beban kronis yang cenderung permanen. Sering terjadi, lantaran tidak mampu membayar utangnya, petani kehilangan tanah miliknya. Tanah jatuh ke tangan pemberi utang atau pihak lain, sedangkan petani yang terlilit utang sekadar menjadi penggarap tanah bekas miliknya itu.

Penyediaan kredit oleh lembaga perkreditan desa, yang diatur AVB, sebenarnya sangat membantu petani khususnya dalam membebaskan mereka dari jeratan utang. Pemberian kredit murah itu ditimbang bisa menjadi cara ampuh untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat pribumi

pada umumnya. Namun, sejalan dengan perkembangan waktu, lembaga perkreditan itu mengalami pergeseran fungsi yang, menurut catatan Margono Djojohadikusumo, seperti dikutip Sumitro, mengarah jadi *popular banks* alih-alih *people's bank*. Pinjaman yang tersedia berupa kredit statis yang bertujuan sekadar menjaga kesejahteraan petani pada aras yang sudah mereka capai "sebisanya"; bukan kredit dinamis yang bermanfaat untuk membangun suatu usaha ekonomi.

Maka, pada bagian akhir kajiannya, Sumitro memandang penting bagi perkreditan rakyat untuk tetap bersandar pada asas-asas koperasi yang, sejak awal, memang menjadi dasar pembentukan lembaga peminjaman resmi itu. Dengan itu pula, Sumitro mengingatkan peran penting institusi koperasi—sebagaimana pernah digagas oleh Mohammad Hatta sebagai sakaguru ekonomi Indonesia. Dalam refleksinya, ia melihat koperasi sebagai "alat perjuangan ekonomi" yang secara berangsur dapat mengurangi, bahkan menghilangkan, ketimpangan struktural dalam perimbangan kekuatan antar-golongan ekonomi tersebut.

Situasi serba-sulit saat malaise (1930) tampaknya makin mengukuhkan kesadaran dan tanggung jawab intelektual Sumitro sebagai calon ekonom profesional. Pergulatan akademisnya menebarkan gagasan bahwa sewajarnya apabila ilmu pengetahuan ikut berperan menyelesaikan permasalahan sosial yang timbul dalam masyarakat. Dalam retrospeksinya yang ia sebut mungkin menyimpan "sindrom nostalgia" saat menerima Piagam Penghargaan Hatta dari Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia di Jakarta (1985), Sumitro menyatakan bahwa ilmu pengetahuan ekonomi selayaknya dihayati



Sebuah kantor koperasi (1950-an). Koperasi adalah institusi perekonomian Indonesia yang digambarkan Hatta sebagai sakaguru ekonomi.



nationalgeographic.grid.id

■
 Pabrik gula dan kebun
 tebu. Pabrik Gula
 Tasikmadu (atas),
 Karanganyar, Jawa
 Tengah masa kolonial
 (atas) dan buruh kebun
 tebu pada era yang sama
 (bawah). Kedua situasi itu
 berlangsung sejak Sistem
 Tanam Paksa. Cermin
 manis dan pahitnya buah
 perekonomian negeri
 terjajah.



istimewa

dalam konteks sosialnya sebab “mengandung arti nyata bagi kebutuhan masyarakat.”

Sosok Pelopor

Tiba kembali di tanah air dari kembara studinya pada 1946, Sumitro langsung bekerja sebagai staf Perdana Menteri Sjahrir—saat pemerintahan Republik Indonesia “dicoba” diubah menjadi sistem parlementer. Pada titik itu, Sumitro mulai menapaki jalan politik pemerintahan setelah sebelumnya sebagai Kuasa Usaha pada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Amerika Serikat; dan sibuk dalam pelbagai kegiatan diplomatik lain di luar negeri, termasuk sebagai

anggota delegasi Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag pada 1949.

Dalam Kabinet Natsir (1950-51), Sumitro diangkat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri saat Indonesia kembali menjadi negara kesatuan setelah sempat diubah bentuknya menjadi negara serikat seturut hasil sidang KMB. Baru setahun ia menjabat menteri, kabinet beralih ke tangan Wilopo (1952). Tapi, ternyata kursi menteri tetap tersedia bagi Sumitro—kali itu sebagai Menteri Keuangan meski juga hanya diduduki setahun. Pada 1953, Kabinet Wilopo jatuh digantikan Ali Sastroamidjojo

■ *Imaji dan kenyataan. Sawah di Pulau Jawa tampaknya menyandang beban berat untuk menyangga kebutuhan pangan penduduknya. Sebagian besar penduduk desa, ketika produksi beras langka pada “zaman meleset” (idiom dari kata malaise), hanya mampu makan dari hasil tanaman tegalan semisal ubi, singkong dan jagung.*



Istimewa

■ *Delegasi KMB tahun 1949 di Den Haag dengan chairman Moh. Hatta; Sumitro Djohadikusumo duduk di posisi paling kanan.*

yang ternyata juga berumur pendek (sekitar 23 bulan); Sumitro absen dalam kabinet ini.

Selanjutnya, Burhanuddin Harahap mengambil alih Kabinet Ali, kembali Sumitro diminta menjadi Menteri Keuangan. Tapi, lagi-lagi cuma sekira setahun (1955-56).

Ikut serta jatuh-bangun bersama kabinet dalam era demokrasi parlementer, "nafas" Sumitro sebagai menteri pun terasa pendek. Walau demikian, sebagai profesional ia berusaha menjalankan tugas sebaik-baiknya. Dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perdagangan dan Industri, ia berhasil menyusun Rencana Urgensi Perekonomian (RUP) yang bertujuan

menguatkan usaha-usaha industrialisasi dengan memadukan kegiatan sektor industri besar dan industri kecil terutama di perdesaan. Dalam jangka panjang, RUP bahkan dinilai sebagai suatu usaha yang bercorak "sangat nasionalistis" untuk mengurangi ketergantungan bangsa pada kepentingan ekonomi asing

Sumitro juga menggagas Program Benteng sebagai bagian tak terpisahkan dari RUP. Program ini bertujuan membangun suatu kelas ekonomi menengah nasional khususnya dari golongan pribumi. Dalam ungkapan sederhana, Program Benteng merupakan upaya pemerintah melindungi usaha ekonomi pribumi.



Istimewa



KITLV

Dalam bukunya yang tergolong terbit awal setelah kemerdekaan, *Persoalan Ekonomi di Indonesia* (1953), Sumitro menulis bahwa berhubung rakyat di perdesaan—semisal petani produsen—hanya memiliki posisi tawar yang lemah berhadapan dengan pihak asing, maka sektor perdagangan luar negeri pun harus “dipribumikan” demi melindungi mereka.

Namun, “rencana Sumitro” praktis tidak bisa berjalan optimal tersebut sebab oleh waktu yang

terbuang akibat rivalitas politik di antara elite pemerintahan parlementer. Situasi politik yang tidak stabil itu bahkan meruntuhkan Kabinet Natsir dalam tempo cepat. Walau begitu Sumitro telah memelopori tradisi penyusunan rencana pembangunan (ekonomi) melalui kebijakan pemerintahan. Langkah Sumitro, dalam banyak hal, menampakkan sifat kepeloporannya. Cukup beralasan untuk mengatakan ia seorang peneroka.

■ *Menuju industrialisasi. Pelatihan penenunan di Jurusan Tekstil, Institut Teknologi Tekstil Bandung era kolonial. Rintisan jalan menuju pembangunan industrialisasi di Indonesia.*



KITLV

KITLV

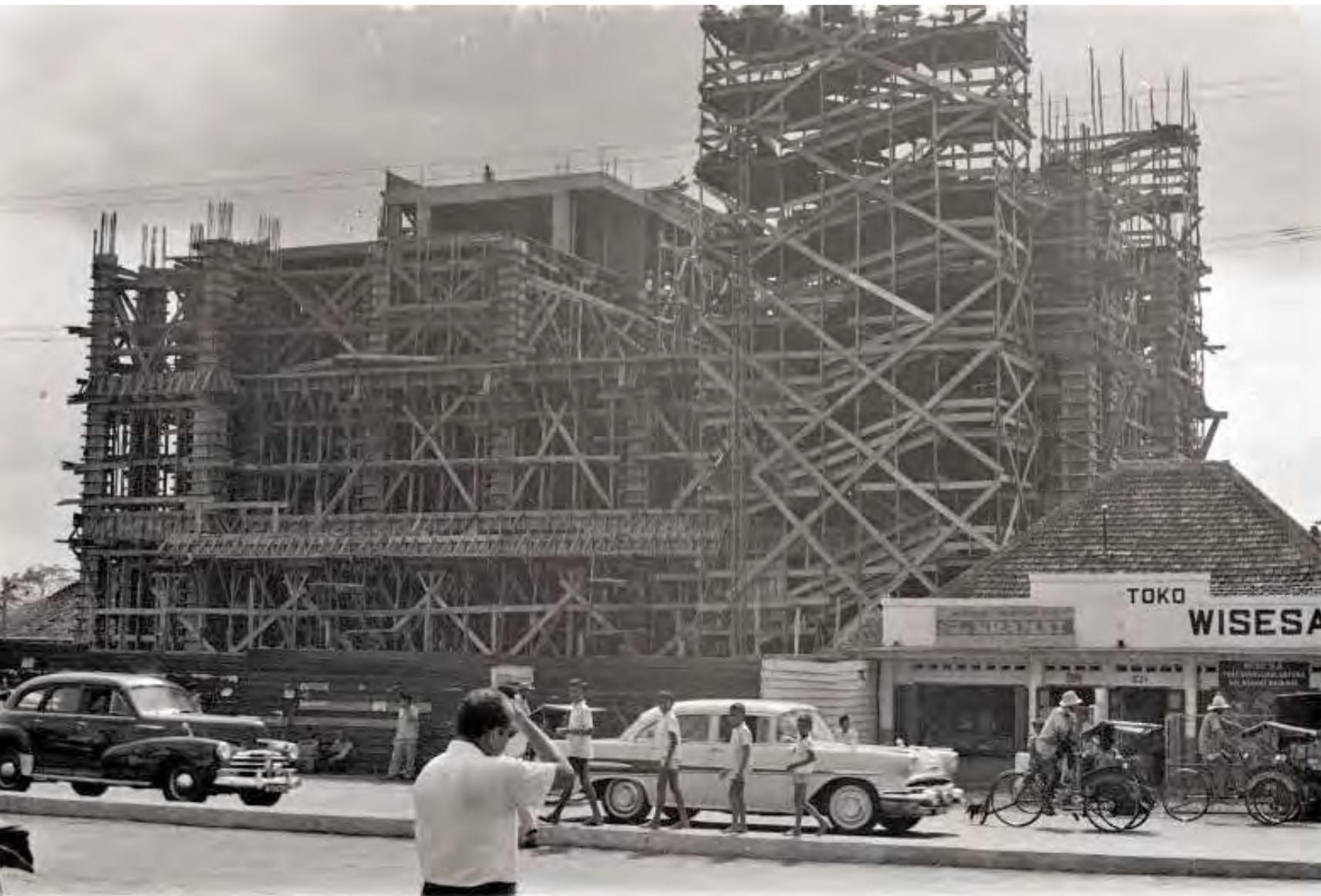
Perajin Batik Pribumi sebagai salah satu target Program Benteng. Contoh sektor ekonomi usaha kecil di negara berkembang. Isu pembangunan ekonomi di negara Dunia Ketiga mulai berembus sejak sekitar 1950-an. Ekonom terkenal asal Swedia, Gunnar Myrdal, menulis dalam monografinya, *Asian Drama* (1968), bahwa "pembangunan berarti perbaikan sejumlah besar kondisi yang tidak diinginkan dalam sistem sosial yang telah mengekalkan keterbelakangan."





KITLV

■ Suasana pasar tradisional di Surabaya tahun circa 1950-an ketika Sumitro menjadi Menteri Perdagangan di Kabinet Natsir. Terlihat ekonomi masyarakat yang masih berada dalam kondisi sulit pasca pengakuan kedaulatan.



KITLV

Suasana pembangunan di Jakarta tahun 1965. Pada tataran akademis ilmu ekonomi pembangunan mekar menjadi cabang baru ilmu ekonomi; sedangkan dalam praksis-sosiologis menyumbang aspek pemikiran dalam perencanaan pembangunan ekonomi di tanah air.

Pada tahun 1952, Sumitro menjadi dekan definitif pertama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, disusul pengukuhan menjadi guru besar pada tahun yang sama. Dengan posisi strategis itu, Sumitro bersama akademisi yang lain melakukan pembaruan kurikulum ilmu ekonomi di kampusnya. Jika sebelumnya ilmu ekonomi dipahami dalam lingkup mikro



Istimewa

dengan titik berat pada ekonomi perusahaan maka dalam paradigma baru, ilmu ekonomi bergerak menuju aras makro yang terhubung dengan tema pembangunan di negara-negara berkembang atawa Dunia Ketiga. Perhatian Sumitro terhadap ilmu ekonomi pembangunan ataupun pembangunan ekonomi tidaklah datang tiba-tiba saat ia menyusun kurikulum di FEUI.

Kesempatan berkiprah dalam pelbagai program, proyek dan tugas internasional pada masa awal Indonesia merdeka semakin memperluas

wawasan intelektualnya memahami ekonomi dunia. Ia, umpamanya, pernah menjadi Wakil Ketua Perutusan Indonesia di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa merangkap Komisaris Perdagangan di New York; anggota delegasi dalam sidang *General Agreement on Tariffs and Trade* di Havana, Kuba; dan anggota delegasi KMB. Patut dicatat pula, Sumitro pernah bekerja dalam tim pengkajian kebijakan perdagangan internasional pada 1953 yang ditunjuk langsung oleh Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammarskjold.

■ Sumitro dalam diskusi 'The Economic Group of New York' untuk studi 'Comodity Trade and Economic Development' - bersama profesor bidang ekonomi dari berbagai universitas ternama

■ *Kampus Universitas Indonesia. Di kampus ini berlokasi Fakultas Ekonomi, tempat Sumitro Djojohadikusumo berkarier sebagai guru besar. Ia dikenal sebagai perintis studi ilmu ekonomi pembangunan. Di salah satu ruangan gedung kampus di Salemba, Jakarta Pusat, ini ISEI pernah berkantor sementara.*

Sementara itu, setelah Perang Dunia berakhir, berkembang pikiran umum dalam komunitas internasional bahwa masalah mendesak bagi negara-negara terbelakang selepas perang ialah pembangunan ekonomi. Organisasi Pertanian dan Pangan, FAO, contohnya, pernah menyatakan bahwa pembangunan di negara-negara kurang maju dipandang sebagai kebutuhan utama pada dasawarsa pertama setelah perang.

Sumitro tiba pada momen yang tepat ketika mengawal perjalanan fakultas ekonomi—bukan hanya di UI, melainkan juga di universitas lain di tanah air yang mendapatkan sentuhannya. Dalam ritme berurutan, fakultas-fakultas ekonomi itu, dengan inti kurikulum ilmu ekonomi pembangunan, dan para pengampunya, rasanya juga datang pada waktu yang pas ketika perekonomian negeri sangat mendesak untuk dibangun demi kesejahteraan rakyat.



SEI

Mexican Economists Association

The First 50 Years

1955-2005

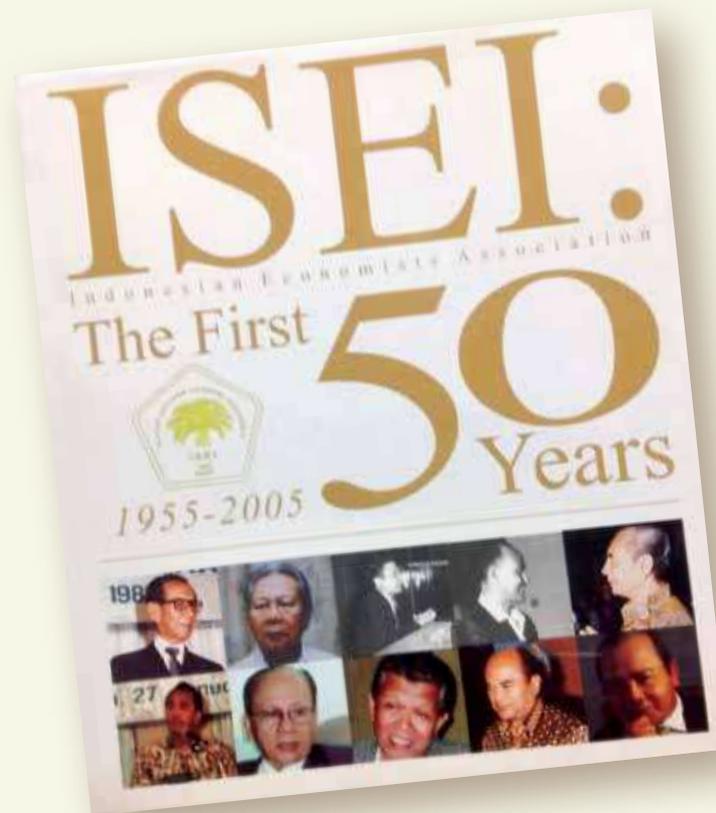




3

SKETSA SETENGAH ABAD PERTAMA

Dari pascarevolusi hingga transisi.
Pengalaman para pemandu
ISEI melintasi masa-masa
kepemimpinannya.



Istimewa

Buku meja kopi ISEI: *The First 50 Years*. Rekaman jejak para ketua ISEI selama setengah abad pertama.

Sepanjang lima puluh tahun pertama perkembangannya (1955-2005), ISEI dipimpin bergantian oleh sepuluh ekonom yang reputasi dan integritasnya tidak diragukan.

Kesepuluh nakhoda tersebut terekam dalam ISEI: *The First 50 Years*, yakni Sumitro Djojohadikusumo (memimpin 1955-57), Sarbini Sumawinata (1957-64), Mulyatno Sindhudarmoko (1964-66), Mohammad Sadli (1966-72), Emil Salim (1972-79), Arifin Siregar (1979-87), J. B. Sumarlin (1987-93), Marzuki Usman (1993-2000), Bambang Sudibyo (2000-03), dan Burhanuddin Abdullah (2003-10).

Kurun setengah abad perjalanan ISEI bukanlah “waktu tunggal” yang merentang lurus

melainkan terbagi dalam *caesuur* (pembabakan) yang dinamis. Pertama adalah masa awal yang berlangsung dari sejak kelahiran ISEI hingga akhir periode pemerintahan Orde Lama (1965). Kedua, babak anyar dalam masa Orde Baru (1966) hingga awal transisi dan Reformasi pada 1998. Selanjutnya adalah era Reformasi yang melintasi abad baru (2010) sebagai bagian ketiga dari episode lima puluh tahun pertama ISEI.

Tantangan Masa Awal

Tampaknya tak cukup banyak waktu tersedia bagi Sumitro Djojohadikusumo, sebagai pendiri dan ketua pertama ISEI, untuk menggerakkan

Sumitro Djojohadikusumo,
Ketua, 1955–57



Istimewa

organisasi yang dibidannya itu. Mungkin karena situasi sosial-politik yang belum sepenuhnya kondusif setelah dekolonisasi, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh organisasi yang masih muda. Namun, boleh jadi, Sumitro telah menghitung bahwa setelah lima tahun menjabat sebagai Dekan FEUI tentu akan lahir sarjana-sarjana ekonomi dari kampusnya yang potensial sebagai “pemegang saham” utama ISE—singkatan nama awal organisasi sebelum berubah menjadi ISEI.

Hanya satu termin, sekitar dua tahun, Sumitro memimpin ISE. Pada 1957, ia mundur dari organisasi yang dibangunnya dengan penuh makna itu karena ia terlibat dalam Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia—suatu gerakan

separatis di Sumatera Tengah yang tidak puas terhadap kebijakan politik pemerintah pusat. Sejak 1955, Sumitro tercatat sebagai anggota Partai Sosialis Indonesia, eksponen utama PRRI. Di luar persoalan politik, mundurnya Sumitro bisa dimaknai sebagai jalan kompromistis agar organisasi itu tidak ikut terseret dalam pusaran perkara yang, bagaimanapun, merupakan urusan pribadi sang pendiri sebagai insan politik.

Sepeninggal Sumitro, Sarbini Sumawinata menggantikan posisinya sebagai Ketua ISEI. Keduanya telah cukup lama menjalin relasi profesional sebagai sesama ekonom. Sarbini diajak Sumitro mendirikan dan mengurus ISEI tak lama sekembali dari studi di Harvard University,

Amerika Serikat. Pada saat bersamaan ia menjabat Kepala Biro Pusat Statistik (1955-65). Seperti halnya Sumitro, Sarbini berpengalaman dalam kerja internasional, antara lain bersama ahli-ahli Bank Dunia, Dana Moneter Internasional dan Departemen Pertanian Amerika Serikat.

Sejak awal menduduki kursi Ketua ISEI, Sarbini sadar menghadapi tantangan pelik di depannya. Ia melihat eksistensi ISEI sebagai entitas idealisme yang tepat tapi berada pada waktu yang salah. Pasalnya, kebijakan Presiden Sukarno yang berkuasa sejak Indonesia merdeka condong mengunggulkan politik yang diterapkan pada banyak aspek kehidupan sosial sehingga memunculkan gejala "politik



Tempo

Sarbini Sumawinata,
Ketua, 1957-64



Repro ISEI The First 50 Years

Sarbini Sumawinata
dan Mulyatno
Sindhudarmoko, ketua
ISEI berikutnya



KITLV

■ *Pembangunan dalam nuansa revolusi. Potret Pembangunan infrastruktur dengan baliho berisi suara anti neo-kolonialisme circa. 1965*

sebagai panglima." Pembangunan ekonomi pun diarahkan sebagai "tugas revolusioner" menghancurkan sisa-sisa imperialisme dan feodalisme serta memobilisasi segenap sumber daya alam untuk membangun ekonomi bercorak "sosialisme Indonesia."

Suasana kala itu menyiratkan suatu zaman yang terkesan tak ramah kepada ekonom "liberal" akademis. walhasil, tak cukup ruang gerak yang memadai bagi Sarbini untuk memimpin ISEI. kegiatan seminar ilmiah atau konferensi, misalnya, terpaksa absen tersebut kelangkaan biaya. Sebagai pribadi ataupun sebagai

figur publik, Sarbini juga menjadi "sasaran tembak" lawan politiknya. Kaum kiri—partai komunis—yang memang menginginkan ISEI bubar berusaha mendongkelya sekaligus menyingkirkan Sumitro. Tuntutan PKI serupa juga dialamatkan kepada Sarbini sebagai Kepala Pusat Statistik.

Manuver golongan kiri yang terus merangsek mendekati pusat kekuasaan ialah menyodorkan Sakirman, tokoh PKI, untuk "menggusur" Sarbini dari kursi Kepala BPS. Upaya itu gagal; bahkan Sarbini meyakinkan saat itu tidak ada kader PKI di lingkungan BPS. Ia bersikukuh pada



Mulyatno
Sindhudarmoko,
Ketua, 1964–66.

Repro ISEI The First 50 Years

posisinya hingga, akhirnya, sekitar tiga pekan sebelum tragedi makar Gerakan 30 September 1965 yang melibatkan PKI, ia menerima surat pemberhentian sebagai Kepala BPS dan untuk sementara digantikan wakilnya. PKI sendiri gagal menguasai pusat statistik negara tersebut.

Sementara itu, untuk memakzulkan Sarbini dari kursi ketua ISEI, orang-orang kiri telah bergerilya sebelum peristiwa G-30-S meletus. Himpunan Sarjana Indonesia, organ PKI umpamanya, berupaya mengakali Kongres ISEI yang akan digelar (1964) menjadi "Musyawarah Besar Sarjana dan Ahli Ekonomi" agar bisa

menampung unsur serikat buruh dan dan ormas pertanian *underbouw* PKI ikut berperan merumuskan strategi ekonomi nasional. Posisi Sarbini sebagai ketua ISEI digoyang supaya bisa digantikan Carmel Budiardjo, alumnus FEUI yang kader komunis. Namun, Sarbini tetap bertahan.

Dalam pemilihan ketua baru, Sarbini menjagokan Mulyatno Sindhudarmoko sebagai calon penggantinya. Mulyatno pun terpilih lewat Kongres III (1964) yang berlangsung di kampus FEUI Salemba, Jakarta, dan didapuk sebagai ketua yang ketiga.

MAHASISWA INDONESIA SIAP MELAKSANAKAN SETIAP -
KOMANDO PEMIMPIN BESAR REVOLUSI INDONESIA BUNG KARNO



Istimewa

■ *Apel siaga, suasana sosial politik 1960-an yang mengunggulkan 'ekonomi komando' dan menepikan 'ekonomi rasional'.*

Saat itu ia Kepala Biro Ekonomi pada Sekretariat Negara—birokrat tulen yang relatif netral meski diketahui masuk anggota HSI. Posisi itulah yang justru jadi daya tawar kompromistis Mulyatno di tengah blok-blok politik. Terbukti kemudian, ia relatif bebas dari kontrol kelompok kiri.

Prinsip independen itu pula yang ia pertahankan bagi ISEI. Seperti pendahulunya, Mulyatno sangat menjaga agar ISEI terhindar dari permainan politik praktis yang tidak sejalan dengan misi organisasi. Pada masa kepengurusannya, ISEI berhasil menyelenggarakan seminar tentang Berdikari pada 1965. Gelaran seminar itu

boleh dikata sebagai acara besar ISEI kala itu karena, pertama, seminar dibuka oleh Presiden Sukarno dan dihadiri pejabat tinggi negara dari level menteri hingga wakil perdana menteri. Dengan seminar itu, ISEI seperti mulai mencairkan hubungan dingin antara pemerintah dan organisasi itu yang terjadi selama masa “kepanglimaan politik” era Demokrasi Terpimpin. Kedua, seminar mengangkat persoalan penting menyangkut pencarian konsep dasar atau corak ekonomi Indonesia pascakolonial.



Antrean panjang warga Indonesia di depan kantor Bank Negara Indonesia untuk menukarkan uang tahun 1966 imbas dari keadaan ekonomi-politik Demokrasi Terpimpin.

Mohammad Sadli,
Ketua Umum, 1966–72



Istimewa.

Memimpin satu termin kepengurusan, Mulyatno terbukti relatif bebas dari kontrol kelompok kiri. Tinggalan lain dari kepemimpinan Mulyatno Sindhudarmoko ialah penguatan identitas 'Indonesia' sebagai bagian tak terpisahkan dari nomenklatur Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia sehingga organisasi itu berjenama lengkap Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia disingkat ISEI. Periode kepemimpinan Mulyatno berakhir pada 1966 seiring terbitnya fajar Orde Baru.

Tatanan Baru

Pada 1966, Indonesia memasuki babak baru sejarah yang secara populer disebut masa (dan pemerintahan) Orde Baru sebagai antitesis terhadap Orde Lama sebelumnya. Orde yang

baru lahir itu diwarisi tumpukan masalah dari orde sebelumnya. Yang mencolok ialah belitan inflasi hingga lebih dari 600 persen sehingga berdampak sangat berat bagi kehidupan masyarakat ramai. Belum lagi masalah politik dan hukum akibat pemberontakan G-30-S serta berbagai implikasi sosialnya dalam jangka panjang.

Maret 1966, ISEI menyelenggarakan Kongres IV di Bandung. Mohammad Sadli, seorang insinyur lulusan Universitas Gadjah Mada (1952) dan Massachusetts Institute of Technology, Amerika Serikat (1956), terpilih sebagai ketua umum baru. Ia juga menimba ilmu ekonomi dari University of California, Berkeley (1957). Akhir pendidikan tinggi Sadli bermuara di FEUI dengan meraih gelar Doktor pada 1963; disusul pengukuhkannya sebagai guru besar di kampus yang sama. Sadli mencapai puncak karier teknokratnya sebagai Menteri Pertambangan (1973-78).

Dua termin kepemimpinan Sadli (terpilih kembali lewat Kongres V di Palembang, 1969) menandai perubahan cukup penting dalam keorganisasian ISEI. Pertama, kepengurusannya—khususnya periode pertama—merupakan batas peralihan dari zaman kepanglimaian politik ke *regime* pembangunan ekonomi negeri. Orientasi perekonomian nasional kala itu condong pada pasar bebas; atau, dalam ungkapan lain, dari *inward looking* menjadi *outward looking*.

Kedua terjadi perubahan relasional cukup drastis antara ISEI dan pemerintah. Jika pada masa Orde Lama pemerintah terkesan "enggan" berkomunikasi dengan ISEI atau ekonom pada umumnya, maka sejak episode Orde Baru hubungan antara kedua pihak menghangat.

Bagi ISEI, menjaga hubungan simbiosis dengan pemerintah menjadi salah satu tujuan sekaligus kewajiban. Kebijakan umum ISEI, menurut Sadli, adalah mendukung pemerintah dengan menyumbang gagasan dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan moneter. ISEI digambarkan layaknya sebuah perkumpulan para pengampu ekonomi negeri yang bisa saling berbicara dan bertukar pikiran dalam ruang-ruang akademis ataupun di ruang publik. Dengan cara itu, beraneka ragam gagasan diakomodasi dan hubungan akrab antaranggota akan terjaga.

Program pemerintah Orde Baru yang memprioritaskan pembangunan ekonomi pada waktu itu tampak jelas berpengaruh terhadap pamor ISEI. Para pengurus dan di antara anggota ISEI banyak terlibat dalam perencanaan, perumusan kebijakan hingga pelaksanaan program pemerintah. Seluruh ketua (umum) ISEI masa Orde Baru duduk sebagai pejabat tinggi negara. Begitu lekat kedua posisi itu pada diri seseorang ketua ISEI hingga terkesan tidak bisa dibedakan apakah ia bertindak sebagai ketua organisasi ataukah sebagai birokrat tinggi.

■ *Mohammad Sadli sebagai Menteri Pertambangan tahun 1973 - 1978*



Mohammad Sadli
berbincang akrab
dengan Emil Salim



Tempo

Bahkan, terbangun suatu pola seleksi bahwa ketua ISEI (sejak 1971) selalu dipilih dari unsur pejabat tinggi negara setingkat menteri, atau yang setara, dalam bidang perekonomian.

Terpilihnya Emil Salim sebagai ketua umum ISEI yang kelima menjadi tanda awal berlakunya pola seleksi tersebut. Ia menggantikan “kakak seperguruan”-nya, Sadli, lewat Kongres IV ISEI di Tretes, Pasuruan, Jawa Timur (1971). Seperti pendahulunya, Emil merupakan pengajar di FEUI, alma mater pertamanya sejak ia menempuh kuliah pada 1951. Ketika melanjutkan studi doktor di University of California, Emil menulis disertasi bertajuk “Institutional Structure and Economic Development” (1964) yang

mencerminkan minatnya pada kajian ilmu ekonomi pembangunan, yang terus konsisten ia tekuni seperti tersirat dalam pidato pengukuhan guru besarnya di UI, “Perencanaan Pembangunan dan Perataan Pendapatan” (1976).

Menurut Emil Salim, proses pembangunan berlangsung tidak dalam “kehampaan sosial” melainkan berinteraksi dengan pelbagai faktor sosial: demografi, lingkungan, pendidikan, kesehatan, pola kehidupan komunitas, hingga tradisi, sejarah dan budaya masyarakat, bahkan dengan gerak internasional. Ringkas kata, proses pembangunan bertemali dengan “rupa-rupa segi manusiawi” di seputar proses.



Tempo

Itu sebabnya, ungkap Emil, ilmu ekonomi selayaknya menjelajahi “wilayah perbatasan baru” seperti halnya ekonomi perencanaan—bagian dari Ilmu Ekonomi Pembangunan yang ia ampu di kampusnya.

Nuansa akademis dalam pandangan Emil Salim tak lepas dari keinginannya untuk menanggalkan cara berpikir “ekonomi komando” ala Ekonomi Terpimpin orde lama dan menggantinya dengan

“ekonomi rasional” yang relevan dengan pembangunan. Dalam wawancara dengan tim penulis buku ini, Emil menegaskan bahwa ekonomi komando lebih merupakan jargon politis, sedangkan ekonomi rasional berbasis ilmu-pengetahuan. Oleh karena itu, dalam paradigma ekonomi rasional perlu ditumbuhkan kemampuan (para sarjana ekonomi) bekerja dengan perangkat analisa.

■ *Emil Salim sebagai Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup (1978 - 1993) berbincang dengan kelompok pecinta alam tahun 1978.*



Tempo

■ Para pengembang ekonomi rasional. Emil Salim dan Moh. Hatta

Adalah Emil Salim pula yang menggagas Ekonomi Pancasila bukan dalam artian ideologis melainkan suatu konsep ekonomi yang ia analogikan serupa bandul jam dinding besar yang mengayun ke kiri-kanan dalam keseimbangan. Berayun ke kanan bermakna bebas mengikuti aturan pasar, sementara bila bergerak ke kiri bermakna menerima intervensi negara dalam perencanaan memusat. Ekonomi Pancasila, jadinya, adalah sistem ekonomi pasar yang terkendali sebagai antonim terhadap ekonomi pasar bebas-liberal.

Ketika terpilih pertama kali sebagai Ketua Umum ISEI, Emil Salim adalah Menteri Negara Bidang Penyempurnaan dan Pembersihan Aparatur Negara merangkap Wakil Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (1971–73). Sedang pada termin kedua, ia adalah Menteri Perhubungan (1973–78). Ia tak menutupi kenyataan bahwa banyak anggota ISEI memangku jabatan tinggi penting dalam pemerintahan. Namun, ia menegaskan, relasi itu semata-mata atas dasar profesionalisme. Suatu imperasi, katanya, untuk tetap menjaga ISEI sebagai organisasi profesi yang bermartabat dan berjuang demi kemaslahatan bangsa dan negara.

Di Cisarua, Bogor, ISEI menggelar Kongres VIII (15–17 Juni 1979). Terpilih sebagai ketua umum yang baru adalah Arifin Mohammad Siregar—dokter ekonomi lulusan Münster Universität, Jerman Barat; dan Direktur Urusan Ekonomi dan Statistik di Bank Indonesia (BI) waktu itu.

Sebelumnya, sejak 1960-an, Arifin telah menjelajahi karier dalam pelbagai pekerjaan dan kegiatan berlingkup internasional, antara lain di Kantor Sekretariat PBB, Dana Moneter

Internasional (IMF), dan Bank Dunia. Di BI, karier Arifin mencapai puncak sebagai Gubernur (1983–85); kemudian menjabat Menteri Perdagangan (1988–93), dan Duta Besar di Amerika Serikat (1993–97).

Dengan begitu, Arifin Siregar merupakan “orang bank” pertama yang memegang kemudi ISEI. Sebenarnya, ketika dilobi Emil Salim untuk menggantikannya sebagai ketua ISEI, Arifin merasa kurang berminat dengan alasan sudah

■ *Rombongan pengurus ISEI bertemu Presiden Soeharto (1984). Pertanda relasi simbiosis*





Istimewa



Tempo

Arifin Siregar, Ketua Umum 1979–87

cukup sibuk dengan tugasnya di BI. Namun, berhubung Widjojo Nitisastro—yang diakrabi sebagai “lurah” di kalangan ekonom—ikut memintanya menjadi nakhoda ISEI, Arifin pun tidak bisa mengelak untuk menerimanya.

Sejak mulai bekerja di BI pada 1971, Arifin menyaksikan pembangunan nasional Orde Baru pada waktu itu mulai meningkat terutama setelah terjadi kenaikan harga minyak di pasar internasional sehingga mendongkrak penerimaan dan devisa negara, tapi menurun dalam dasawarsa berikutnya akibat harga minyak dunia anjlok. Maka, ketika diangkat pemerintah sebagai Gubernur BI (Maret 1983), disusul terpilih sebagai Ketua Umum ISEI empat bulan kemudian, Arifin merasakan perkembangan

ekonomi nasional kala itu sedang menghadapi tantangan berat. Laju pertumbuhan ekonomi menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Untuk mengatasi situasi resesi tersebut, langkah Arifin Siregar sebagai Gubernur BI bersama pemerintah ialah melakukan penyesuaian dalam kebijakan pembangunan yang dikenal sebagai paket kebijakan deregulasi. Intinya, deregulasi adalah kebijakan meniadakan aturan-aturan (pemerintah) yang sekiranya menghambat gerak dunia usaha. Melalui ISEI, Arifin juga menyarankan agar pemerintah sering menerbitkan paket deregulasi demi memperlancar dunia usaha.



Tempo

Hal baru dalam termin kedua kepengurusan Arifin Siregar ialah program pemberian piagam penghargaan ISEI kepada ekonom yang dipandang berjasa luar biasa dan berkontribusi besar mendorong perekonomian Indonesia. Program itu diberi nama Penghargaan Hatta untuk mengenang jasa Mohammad Hatta baik

sebagai proklamator kemerdekaan maupun sebagai ekonom bereputasi; juga pernah menjadi ketua kehormatan ISEI. Untuk pertama kali, piagam Penghargaan Hatta diberikan kepada Sumitro Djojohadikusumo dan Widjojo Nitisastro, bertepatan dengan ulang tahun ke-30 ISEI pada 1985.

■ Arifin Siregar dan begawan ekonomi Sumitro Djojohadikusumo dalam Seminar ISEI di Jakarta (2000)



Koleksi ISEI Pusat

■ Dua pendekar ekonomi. Sumitro Djohadikusumo dan Widjojo Nitisastro menerima penghargaan piagam Hatta (1985)



Koleksi ISEI Pusat

■ Bimbo di tengah perayaan 30 tahun ISEI (1985). Di antara awak Bimbo terdapat ekonom yaitu Jaka, lainnya senirupawan dan sarjana hukum.



koleksi ISEI

Kepengurusan Arifin Siregar periode kedua sempat mulur sekitar satu tahun sampai 1987 sehingga ia memimpin ISEI total selama delapan tahun sejak 1979. Ia mengundurkan diri dan mengusulkan melalui Emil Salim, sebagai tokoh senior ISEI, untuk mencalonkan J.B. Sumarlin sebagai ketua umum yang baru.

Usulan Arifin Siregar terwujud: J.B. Sumarlin terpilih sebagai Ketua Umum ISEI dalam Kongres X di Denpasar, Bali (September 1987). Sumarlin bukan orang baru karena telah menjadi anggota

ISEI sejak 1958 tak lama setelah lulus dari FEUI. Di kampus Salemba itu, selama kuliah, Sumarlin telah mengenal Widjojo Nitisastro, Ali Wardhana dan Emil Salim, seniornya yang kelak menjadi mitra kerja dalam kabinet Orde Baru. Jelas pula Sumarlin tergolong paling muda di antara tim inti teknokrat Orde Baru itu.

Begitu pula dalam pendidikan lanjutan, Sumarlin seperti "membuntuti" kakak-kakak kelasnya. Ia menempuh jenjang Master di University of California (1960), sedang gelar doktornya

Arifin Siregar memandu Kongres X ISEI di Denpasar, diapit Sekretaris Umum Abdul Gani dan Mohammad Sadli (1987)

Acungan semangat
setelah terpilih sebagai
Ketua Umum (1987)



Tempo

diraih dari University of Pittsburgh, Pennsylvania (1968). Sekembali dari studi, Sumarlin menjabat sebagai staf ahli Menteri Keuangan Ali Wardhana, Deputy Ketua, kemudian Wakil Ketua, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (1973). Jabatannya di kabinet ialah Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara (1973–83; dua periode), Menteri Keuangan (1988–93), selain sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan *ad interim* (1973/74 dan 1985).

Terakhir, Sumarlin diangkat sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (1993–98).

Sebagai ketua umum ISEI, hal pertama yang dipikirkan Sumarlin ialah tentang keanggotaan organisasi itu. Menurut amannya, keanggotaan ISEI kala itu cenderung terbatas hanya untuk ekonom yang berpendidikan ilmu ekonomi umum yang identik dengan ekonomi pembangunan. Ia ingin mengubah aturan



Tempo

resmi keanggotaan ISEI dengan memasukkan mereka yang berlatar pendidikan akuntan, pertanian, dan ilmu-ilmu lain yang berkorelasi dengan pembangunan ekonomi. ISEI, dalam bayangan Sumarlin, adalah entitas homogen tapi mengandung unsur-unsur heterogen.

Dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar FEUI bertajuk “Pembangunan Negara-negara Berkembang dalam Interdependensi Ekonomi Dunia” (1981), Sumarlin mengingatkan bahwa ekonomi dunia telah lama ditandai berbagai ketimpangan antara negara maju vis-à-

■ *Menteri Keuangan J. B. Sumarlin berbincang dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Harjono (kiri) di Jakarta (1988)*



koleksi ISEI

■ *Sumarlin, Sumitro dan peserta Sidang Pleno ISEI di Bukittinggi, Sumatera Barat (1989)*

vis negara berkembang atau Dunia Ketiga. Pola dan sistem ekonomi yang disusun oleh negara-negara industri maju pada hakikatnya untuk melayani kepentingan ekonomi dan politik mereka. Alokasi sumber keuangan dunia dan kerja sistem moneter internasional, misalnya,

tidak memperhatikan kepentingan dan kurang memberikan kesempatan bagi negara-negara berkembang.

Dalam termin kedua kepengurusannya, Sumarlin membidani lahirnya Indonesia Forum (1991),

suatu ruang komunikasi bagi unsur swasta untuk saling tukar informasi dan gagasan. Mohammad Sadli, mantan pemimpin ISEI, ditunjuk sebagai ketua Forum. Terpisah dari struktur ISEI, Indonesia Forum lebih fleksibel mengadakan aktivitas diskusi atau konsultatif dengan banyak kalangan mengenai isu-isu aktual perekonomian dan pembangunan.

Johannes Baptista Sumarlin adalah pemimpin ISEI terakhir dari unsur pejabat tinggi era Orde Baru. Dalam pemerintahan orde itu pun, ia juga merupakan “generasi teknokrat” terakhir yang masih menduduki jabatan puncak institusi negara hingga awal gerakan Reformasi pada 1998. Sumarlin mengakhiri kepengurusannya di ISEI setelah Kongres XII di Surabaya (1993) memilih Marzuki Usman sebagai ketua umum ISEI yang baru.

■ *J. B. Sumarlin dan B.J. Habibie usai rapat di gedung DPR (1980).*



Marzuki Usman bersama peserta kongres saat terpilih sebagai ketua umum dalam Kongres XII di Surabaya (1993)

Melintasi Transisi

Dilihat dari linimasa perkembangan sosial kontemporer, Marzuki Usman termasuk aktor yang mengawali karier pekerjaannya pada masa Orde Baru. Ia bergabung dengan Departemen Keuangan sejak 1969 sebagai staf Direktorat Jenderal Keuangan; diseling pendidikan lanjutan di Duke University, Durham, Amerika Serikat (Master of Arts, 1975). Jabatan tertinggi

terakhirnya ialah Kepala Badan Pengelola Pasar Modal (1988–91); Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (1991–95), dan Kepala Badan Analisis Keuangan dan Moneter (1995–98).

Memasuki masa transisi awal Reformasi, Marzuki Usman menjabat Sekretaris Kementerian Negara Pendayagunaan BUMN (1998). Adapun jabatan menteri yang pernah diampunya ialah



Tempo



Tempo

Menteri Pariwisata, Seni dan Budaya (1998–99), dan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Kepala BKPM (1999)—kedua jabatan kementerian ini dalam masa Kabinet Reformasi Pembangunan di bawah Presiden B. J. Habibie. Berikutnya, Marzuki duduk sebagai Menteri Kehutanan dan Perkebunan (2001) pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid.

Dengan demikian, saat dipilih kali pertama sebagai ketua umum ISEI, Marzuki Usman berstatus sebagai pejabat tinggi departemen (Eselon I) yang mengurus bidang pendidikan dan pelatihan. Sedangkan ketika dipilih kembali sebagai pemimpin ISEI untuk kedua kalinya (melalui Kongres XIII, 1996), Marzuki adalah Kepala Badan Analisis Keuangan dan Moneter. Baru pada ujung masa kepengurusan periode

■ *Marzuki, Sumitro dan peserta konferensi Sejarah Ekonomi Modern Indonesia di kantor LIPI (1991).*



Koleksi ISEI pusat

Marzuki Usman, Ketua Umum, 1993–2000

kedua itu, Marzuki berada pada jabatan menteri yakni Menteri Negara Penggerak Dana Investasi (mulai 1999).

Pilihan atas Marzuki Usman sebagai ekonom dan pakar pasar modal menjadi ketua umum ISEI dipandang tepat di tengah situasi krisis keuangan negara. Ketika menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Pasar Modal, Marzuki

berhasil menumbuhkan pola pikir mengenai pentingnya berinvestasi di kalangan masyarakat luas. Begitu pula waktu menjadi Komisaris Utama Bursa Efek Jakarta, Marzuki seperti menebarkan “demam” investasi; ribuan calon investor rela antri membeli saham di pasar modal.

Dalam wawancara dengan tim penyusun buku ini, Marzuki Usman sempat menyinggung

soal perlunya meningkatkan pengembangan hubungan (pengurus) pusat dan daerah. Hal yang sama juga pernah dilontarkan Emil Salim sebelumnya ketika ia menyatakan bahwa pembangunan nasional juga harus menyentuh pembangunan daerah. Faktanya, di seluruh daerah di Indonesia tersimpan potensi sumber daya ekonomi dan sumber daya manusia yang patut dikembangkan dan diberdayakan demi pembangunan daerah ataupun nasional.

Bukan suatu kebetulan jika isu pembangunan ekonomi daerah ternyata menjadi tema

Kongres XIV ISEI di Makassar jelang akhir kepengurusan Marzuki: yaitu Membangun Ekonomi Daerah yang Kompetitif dan Efisien dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Memperkokoh Kesatuan Bangsa. Isu desentralisasi dan pembangunan daerah menjadi perhatian utama di tengah upaya Indonesia bangkit dari krisis multidimensi. Perhatian yang lebih besar pada pembangunan daerah diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meredakan isu disintegrasi sekaligus memperbaiki ketimpangan antarwilayah.

■ Marzuki Usman (kiri), bersama Burhanuddin Abdullah (kanan), memberikan keterangan kepada wartawan sesuai melakukan pertemuan tertutup dengan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan (2015). Keduanya memberikan saran dan masukan kepada pemerintah dalam mengatasi masalah keterpurukan perekonomian Indonesia.





Koleksi ISEI Pusat

Bambang Sudibyo dan Arifin Siregar dalam sebuah pertemuan ISEI tahun 2004.

Kongres Makassar (21–23 April 2000), sesuai konvensinya, memilih ketua umum yang baru untuk menggantikan Marzuki Usman. Terpilih sebagai ketua baru adalah Bambang Sudibyo, seorang akuntan. Ia lulus dari Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (1977), dan langsung ditawarkan mengajar kembali di almaternya mulai tahun berikutnya hingga diangkat sebagai guru besar. Bambang melanjutkan studi di North Carolina University, Amerika Serikat (MBA, 1980); dan mengikuti program doktor di Kentucky University hingga rampung pada 1985.

Bambang Sudibyo mendaftar sebagai anggota ISEI sejak ia lulus sarjana, sekaligus telah tercatat sebagai anggota Ikatan Akuntansi Indonesia pada 1977. Bukan sekadar terdaftar dan menjadi Ketua Umum ISEI, dalam posisinya itu ia diangkat sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat, Fraksi Utusan Golongan mewakili ISEI (2001). Saat terpilih sebagai Ketua Umum ISEI, Bambang Sudibyo adalah Menteri Keuangan pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid hingga memasuki milenium baru.

*Tempo*

Presiden KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur berdialog dengan Ketua DPR Akbar Tandjung, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Sudibyo dan Panglima TNI Laksamana Widodo AS pada pertemuan/ dengar pendapat Presiden dengan ketua fraksi-fraksi DPR di Gedung MPR/ DPR, Jakarta, 1999.

*Tempo*

Menteri Keuangan Bambang Sudibyo dan Menteri Pertambangan dan Energi Susilo Bambang Yudhoyono sesuai acara dengar pendapat antara Presiden KH Abdurrahman Wahid dengan anggota DPR di gedung DPR/MPR RI, Jakarta tanggal 27 April 2000 [Tempo/Bernard Chaniago;



Tempo

■ Bambang Sudibyo (kiri), berbincang dengan Sri Mulyani Indrawati di Istana Presiden, Jakarta (2006)

Dalam *First 50 Years*, Bambang Sudibyo memberi catatan kritis tentang perlunya transformasi ISEI menjadi organisasi profesi yang benar-benar profesional. Untuk itu perlu revisi statuta organisasi sehingga mampu menarik ekonom untuk bergabung. Ia juga memberi contoh bandingan organisasi serupa di luar negeri yang disebutnya sangat prestisius dan memberi perasaan “sangat spesial” bagi anggotanya. Organisasi profesi, lanjutnya, harus memiliki jurnal ilmiah untuk menampung artikel, analisis dan hasil riset anggotanya.

Meski memberi catatan kritis, Bambang Sudibyo melihat ISEI telah melakukan sebagian tugasnya sebagai organisasi profesi. Ia melihat, misalnya, ISEI cukup banyak mencetak publikasi ilmiah seperti jurnal dan hasil seminar. Ia juga terus

mendorong seminar, lokakarya, simposium, lomba penulisan ilmiah, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan ilmu-pengetahuan. Untuk membiayai berbagai aktivitas itu, pada 2001 Bambang Sudibyo membentuk Yayasan ISEI sebagai forum komunikasi antara anggota sekaligus wadah penghimpunan dana.

Selama masa kepengurusannya, Bambang Sudibyo merasakan situasi perekonomian nasional masih dibayang-bayangi suasana suram buntut krisis global. Negara dihadapkan pada darurat keuangan dan krisis kepercayaan terhadap investor akibat lemahnya penegakan hukum. Terjadi teror bom di Bali yang menewaskan ratusan orang, termasuk turis asing, sehingga makin menjauhkan Indonesia dari investasi. Belum lagi demonstrasi dan



Tempo

kerusuhan komunal yang sangat mengganggu aktivitas ekonomi juga menakutkan bagi penanam modal.

Untuk mengatasi krisis moneter dan demi penyelamatan bangsa dari situasi keterpurukan ekonomi, pada 1997 pemerintah menerima pinjaman dana dari IMF dengan segala kontroversinya. Tentang masalah itu, Bambang Sudibyo menyerukan agar Indonesia segera mengakhiri kerja sama dengan IMF. Dalam seminar yang digelar ISEI (Oktober 2002), ia menekankan pentingnya independensi ekonomi nasional. Hal itu bisa dicapai, katanya, dengan mengerahkan segala kekuatan ekonomi, mempersempit kesenjangan sosial dan meningkatkan upah pekerja.

Kongres XV ISEI di Batu, Jawa Timur (13–15 Juli 2003) menjadi titik akhir kepemimpinan Bambang Sudibyo. Memimpin satu periode, ia digantikan oleh Burhanuddin Abdullah, seorang bankir. Sedangkan Bambang Sudibyo, tahun berikutnya, diangkat sebagai Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Indonesia Bersatu di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ketika terpilih sebagai ketua umum ISEI yang kesepuluh, Burhanuddin Abdullah baru dilantik sebagai Gubernur Bank Indonesia sekitar dua bulan sebelumnya. Dengan demikian, ia merupakan “orang bank” kedua setelah Arifin Siregar yang terpilih menjadi ketua umum ISEI. Lulus sebagai insinyur pertanian dari Universitas

Presiden KH
Abdurrahman Wahid,
Wakil Presiden Megawati
Sukarno Putri, Menteri
Keuangan Bambang
Sudibyo saat dengar
pendapat di DPR (1999)

■
Selepas masa bakti di
ISEI, Bambang Sudibyo
menjadi Menteri
Pendidikan Nasional.
Tampak sedang
berbincang dengan mitra
kerja serumpun Brunei
Darussalam dan Malaysia
(2006)



Tempo

■
Burhanuddin Abdullah,
Ketua Umum, 2003–10



Tempo



Tempo

Padjajaran, Bandung (1974), ia memulai karier pekerjaan sebagai staf Bagian Kredit Produksi BI, dan beberapa jabatan di BI di luar negeri. Ia melanjutkan studi di Michigan State University, Amerika Serikat (Master of Arts, 1984). Jabatan tinggi penting lain yang pernah ia pangku adalah Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri semasa Presiden Abdurrahman Wahid (2001).

Dalam *First 50 Years*, Burhanuddin berharap ISEI mempromosikan suatu ekonomi pasar yang inklusif dan lebih partisipatif. Dengan mengakui ekonomi inklusif, patut diperhitungkan

kontribusi usaha kecil dan menengah sebagai salah satu pilar ekonomi Indonesia. Masih perlu banyak pikiran dan tenaga dicurahkan untuk mengangkat harkat usaha kecil-menengah itu sampai pada posisinya yang kukuh.

Di Manado, Sulawesi Utara, ISEI menggelar Kongres XVI (18–20 Juni 2006) bertema 'Meletakkan Kembali Dasar-dasar Pembangunan Ekonomi yang Kokoh'. Menurut panitia, tema itu diangkat setelah mempertimbangkan lambatnya pemulihan ekonomi Indonesia pascakrisis. Lambatnya pemulihan itu ditengarai ada yang salah dalam pondasi perekonomian

■ *Ekonom dan diplomat; Arifin Siregar dan Burhanuddin Abdullah berbincang santai dengan Menteri Luar Negeri Ali Alatas (2003)*



Tempo

(Atas) Burhanuddin
Abdullah, Dorodjatun
Kuntjoro-Jakti, Budiono
dan David Nellor usai
penandatanganan letter
of intent Indonesia dan
IMF (2003)

(Bawah) Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono
didampingi Gubernur
Bank Indonesia (BI)
Burhanuddin Abdullah
(2005)



Tempo



Tempo

nasional sehingga perlu diperbaiki. Pada saat bersamaan, terjadi perubahan iklim demokrasi yang ditandai oleh kecenderungan desentralisasi termasuk di bidang ekonomi. Daerah didorong mandiri mengembangkan ekonominya demi pembangunan daerah itu.

Dalam sambutan pembukaan Kongres, Burhanuddin mengingatkan tentang pilar-pilar baru ekonomi Indonesia masa depan yang patut dicermati, yakni globalisasi, desentralisasi dan demokratisasi. Sejalan dengan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang meresmikan pembukaan kongres, mengamanatkan agar ISEI dapat menjawab tantangan zaman menghadapi

lingkungan dunia yang berubah karena globalisasi, perdagangan bebas dan pasar terbuka. Begitu pula proses desentralisasi dan otonomi daerah di dalam negeri perlu ditangani secara arif.

Kepengurusan Burhanuddin Abdullah menutup rangkaian sketsa setengah abad pertama perjalanan ISEI hingga melintasi titik transisi. Dalam kongres di Manado itu, ia terpilih kembali sebagai Ketua Umum untuk kedua kalinya. Artinya, ia tetap mengemudikan ISEI melewati batas setengah abad tersebut untuk memasuki babak lanjutan dalam episode baru.

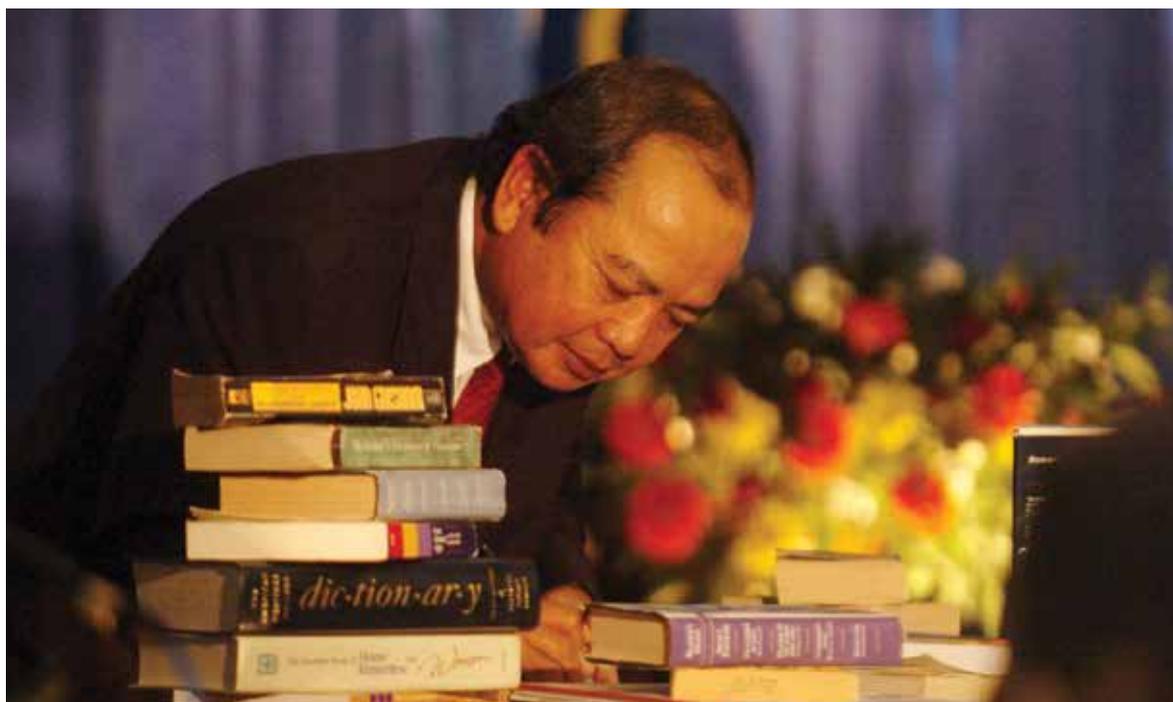
■ *Burhanuddin Abdullah bersama Joseph E. Stiglitz, peraih Nobel Ekonomi dalam kuliah umum yang disponsori ISEI tentang isu-isu ekonomi dan dampaknya pada negara berkembang di Jakarta (2004)*

Menteri Keuangan (Menkeu), Boediono (kiri) dan Gubernur Bank Indonesia (BI), Burhanuddin Abdullah saat rapat dengan Komisi IX DPR



Tempo

Burhanuddin menandatangani karyanya, *Jalan Menuju Stabilitas dalam bedah buku* di Jakarta (2006)



Tempo





4

MEMBUKA RUANG BAGI RAKYAT

Mendekatkan sektor industri dan usaha kecil. Upaya Darmin Nasution menyeimbangkan kebijakan perekonomian.

Ketika terpilih sebagai Ketua Umum ISEI pada 2009, Darmin Nasution baru menerima pengangkatannya menjadi Deputy Gubernur Senior (DGS) Bank Indonesia selang beberapa hari sebelumnya. Ia seperti menerima tongkat estafet pimpinan ISEI dari seniornya, Burhanuddin Abdullah, yang juga dari BI. Meski begitu, Darmin saat itu mengaku masih "orang fiskal" karena posisinya sebagai Direktur Jenderal Pajak. Barulah setelah resmi dilantik sebagai DGS-BI, ia dipersepsikan banyak orang seperti masuk ke "sarang orang moneter"-nada guraunya dalam Bank Sentral itu Harus Membumi, biografinya.

Darmin Nasution mengingat, ia tercatat menjadi anggota ISEI tak lama setelah lulus Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia (1970). Selama dua puluh tahun berikutnya ia tetap betah di kampusnya sebagai peneliti

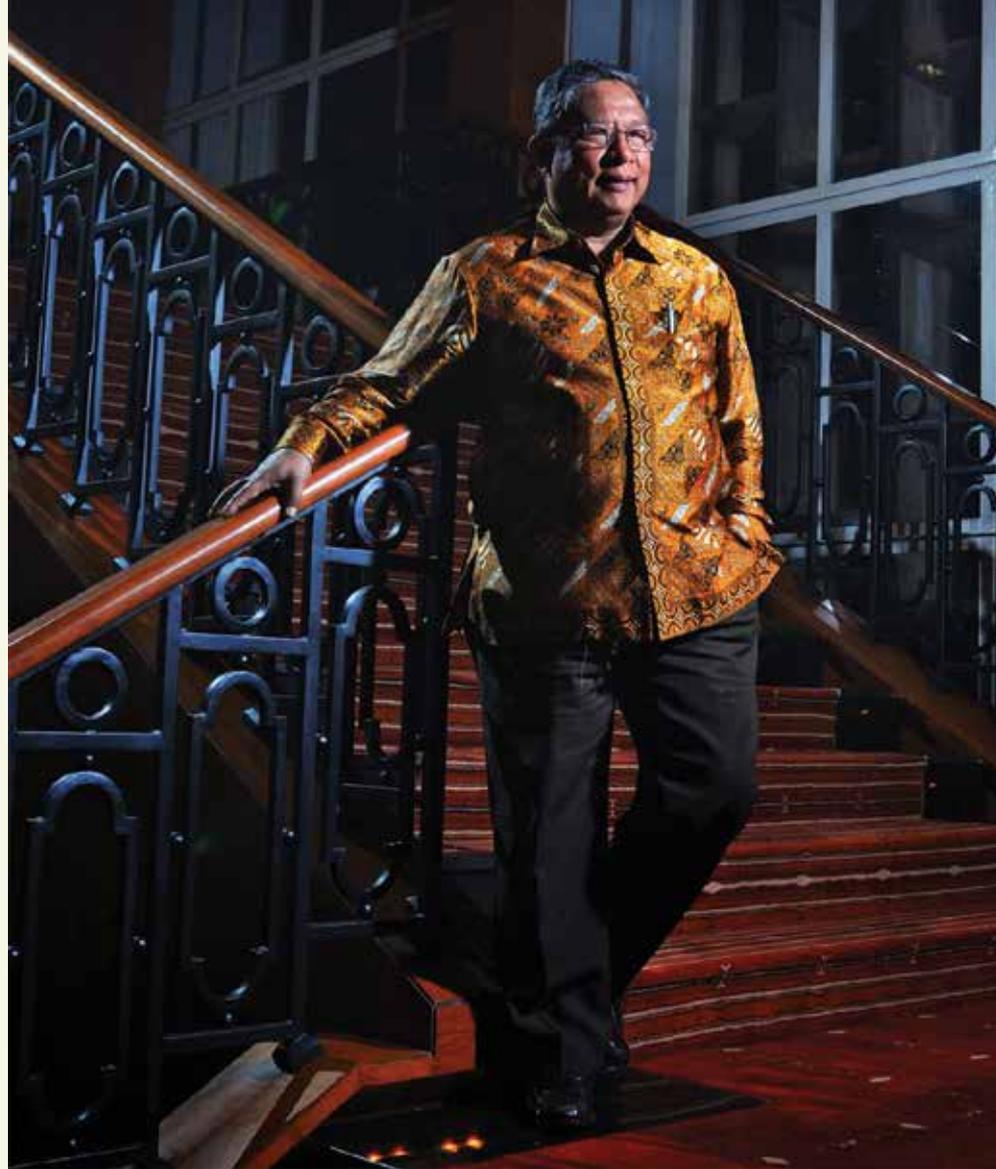
*Istimewa*

Darmin Nasution, Ketua
ISEI 2009–2015

dan pengajar. Ia lalu berkarier sebagai birokrat di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Produksi dan Distribusi; lanjut pindah ke Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Penertiban Aparatur Negara. Akhirnya, ia berlabuh di Departemen Keuangan dengan jabatan tertinggi Direktur Jenderal Pajak pada 2006 hingga diangkat sebagai DGS-BI; dan menjadi Gubernur BI definitif mulai 2010 sampai pensiun pada 2013.

Pecinta tanaman anggrek itu meraih gelar Doktor dari Universitas Sorbonne, Paris, Prancis (1983). Dilihat dari latar belakang pendidikan, terpilihnya Darmin Nasution boleh dikata menjadi penanda kembalinya kelompok "alumnus Eropa" memimpin ISEI setelah Sumitro Djojohadikusumo (lulusan dari Negeri Belanda) dan Arifin Siregar (Jerman). Sementara, sejauh ini, mayoritas ketua ISEI merupakan

Darmin Nasution pernah menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Koordinator Perekonomian



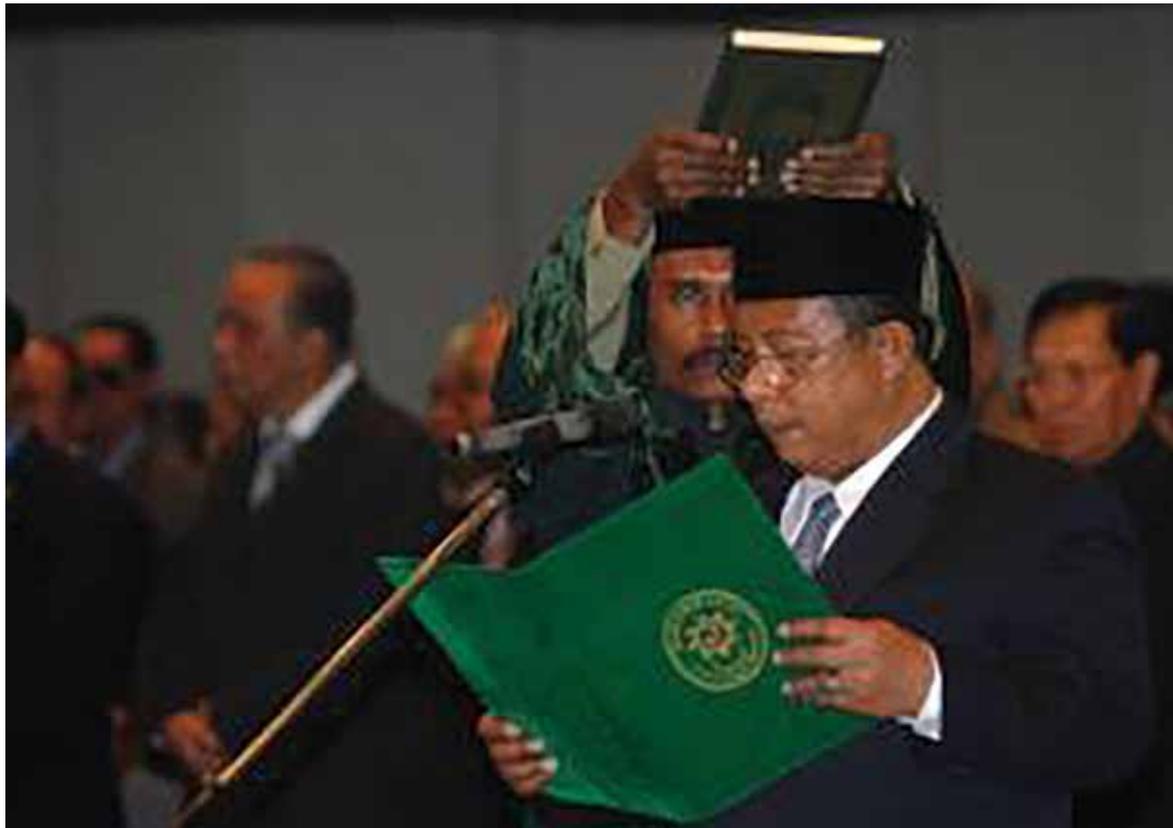
Tempo

ekonomi lulusan universitas di Amerika. Dari sisi ISEI, variasi latar belakang pendidikan para ketua itu tentu memperkaya “genre” pemikiran intelektual yang disumbangkan organisasi.

Pada Darmin Nasution wajar jika kecenderungan pemikiran intelektualnya dalam ekonomi sedikit-banyak terpengaruh “tradisi Prancis” yang condong sosialis. Banyak orang, termasuk kolega dekatnya, menilai pemikiran ekonominya bersifat populis. Tapi, dalam biografinya, ia mengaku cocok di jalur pemikiran “ekonomi institusional” yang berada di luar mainstream

pemikiran neoklasik. Intinya, ekonomi institusional mempertimbangkan arti penting faktor-faktor nonekonomi seperti sosiologi, sejarah, budaya, dan kelembagaan masyarakat lainnya, dalam memahami ataupun membentuk perilaku ekonomi.

Dalam membentuk pasar (market), Darmin mencontohkan, tidak bisa dirancang sebebas-bebasnya demi melayani pemodal asing semata yang umumnya hanya mengejar keuntungan jangka pendek dan tidak memedulikan dampaknya bagi rakyat banyak. Pasar harus



Tempo

dibentuk sedemikian rupa sehingga memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat luas. Perilaku pasar harus diarahkan melalui institusi, sistem dan regulasi berbasis *fairness* dengan mekanisme insentif dan penalti; termasuk di sini cara pembiayaan yang murah dan mudah. Inti pemikiran Darmin ialah ingin membuka ruang bagi usaha ekonomi rakyat untuk mendapatkan pembiayaan murah.

Langsung atau tak langsung, pemikiran dasar Darmin Nasution tersebut mewarnai kepemimpinannya di rumah besar ISEI (sejak 2009). Dalam suatu wawancara dengan tim penyusun buku ini ia menyatakan beberapa hal. Pertama-tama membenahi aspek kelembagaan

organisasi, terutama menyangkut hubungan (pengurus) pusat dan daerah, begitu pula dengan perguruan tinggi karena hal itu berkaitan dengan sumber daya manusia, khususnya dalam membangun *teamwork* sebagai ciri kerja organisasi. Keanggotaan ISEI tak perlu dibatasi hanya orang-orang idealis, tapi juga perlu unsur pragmatis; yang penting punya konsep, tahu ke arah mana berkembang, dan tidak menyangand beban tertentu yang menyebabkan sulit bergerak.

Seperti dalam kepengurusan ISEI masa-masa sebelumnya, Darmin Nasution terus menjalin hubungan baik sebagai mitra pembangunan dengan pemerintah seraya tetap menjaga

Darmin Nasution membacakan sumpah saat dilantik menjadi Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia di Gedung Mahkamah Agung, menggantikan posisi Miranda S. Goeltom yang habis masa jabatannya



Tempo

Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Perekonomian menginspeksi terowongan Mass Rapid Transportation.

independensi organisasi. Dalam program kerja atau kerja sama dengan pihak ketiga, ISEI mendekati pada dunia industri ataupun sektor usaha kecil. Apabila disandingkan, kedua arah pendekatan ISEI itu dapat dilihat sebagai semangat untuk mengatasi persoalan dikotomi dualitas sektor “besar-kecil” yang nyata ditemukan dalam realitas perekonomian Indonesia sejak berabad-abad yang lalu.

Memberdayakan ‘Si Kecil’

Selama dua hari (20–22 Juli 2010), ISEI melaksanakan Sidang Pleno XIV di Bandung. Menurut laporan panitia, sidang diikuti sekitar 650 orang terdiri dari ekonom yang bergiat dalam pelbagai pekerjaan. Sebanyak 51 pengurus cabang ISEI dari berbagai daerah di tanah air berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Sidang Pleno dihadiri Wakil Presiden Boediono

yang meresmikan pembukaan. Dalam waktu bersamaan disemarakkan rapat kerja Persatuan Istri Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia.

Tema besar Sidang ialah 'Revitalisasi UMKM untuk Menggerakkan Perekonomian Nasional'. Menurut panitia, tema itu dipilih dengan pertimbangan bahwa pada 2008 terdapat 51,2 unit usaha mikro kecil dan menengah atau 99,98 persen dari total pelaku ekonomi nasional yang berkontribusi menyerap 97,04 persen dari total tenaga kerja di Indonesia. Selain itu, UMKM telah berkontribusi signifikan terhadap pendapatan domestik bruto hingga 55,56 persen dari total

PDB nasional, sementara nilai ekspor nonmigas sektor ini mencapai 20,17 persen dengan jumlah investasi mencapai 52,09 persen.

Kontribusi UMKM bahkan masih dapat berkembang lebih besar jika berbagai akses permodalan dapat mudah dijangkau. Di sisi lain, perkembangan UMKM masih terhambat oleh bermacam faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal berupa masalah klasik yang merundung UMKM yakni lemahnya permodalan dan kemampuan manajerial seperti tata kelola, produksi, pemasaran, dan sumber daya manusia. Sementara, faktor eksternal

■ Darmin Nasution sebagai Menko Perekonomian membuka ekspo produk koperasi dan UMKM pada peringatan Hari Koperasi Nasional 2019 di Banyumas, Jawa Tengah.



Antara



Antara

■ *Darmin Nasution sebagai Menteri Koordinator Perekonomian di Pusat Inovasi Rotan Nasional, Palu, Sulawesi Tengah (2017). Pemerintah mempertahankan kebijakan larangan ekspor rotan mentah demi menumbuhkan industri rotan nasional.*

timbul dari pihak pembina UMKM—dalam hal ini pemerintah pusat atau daerah—seperti solusi yang tidak tepat, tanpa monitoring yang bersinergi, dan program yang tumpang tindih antarlembaga.

Menyambut pembukaan Sidang Pleno, Darmin Nasution menyatakan bahwa dalam perkembangan ekonomi nasional, UMKM berperan signifikan serta berkaitan langsung

dengan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan sebagian besar rakyat Indonesia. Pada dasarnya, UMKM merupakan kekuatan dan pertumbuhan ekonomi nasional dan juga sebagai perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru serta menyerap tenaga kerja dan menekan angka pengangguran. Pendekatan pembangunan yang ditujukan pada pelaku UMKM, lanjutnya, sangat penting untuk mempertegas penataan struktur pelaku



Antara

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan Buku Laporan Perekonomian Indonesia 2018 kepada Darmin Nasution yang saat itu menjabat sebagai Menko Perekonomian di Gedung BI, Jakarta (2019).

ekonomi nasional yang selama ini dalam kondisi dualistik dan timpang.

Apa yang disampaikan Darmin tersebut seperti memantulkan kegelisahannya sebagai pemikir ekonomi institusional sebagaimana pengakuannya. Ia merasa heran mengapa usaha-usaha besar bisa memperoleh pembiayaan pengembangan dengan mudah dan berbunga rendah; tapi begitu sulit “minta ampun” bagi usaha kecil dan mikro dan, bila berhasil diperoleh, bunganya sangat tinggi. Kalau mau jujur dan adil, katanya, pembangunan yang inklusif harus bisa menjangkau mereka semua. Namun, nyatanya, hingga kini UMKM masih dipandang sebelah mata.

Upaya ISEI mengangkat masalah UMKM dalam sidang pleno itu terhitung serius. Jauh hari sebelum pelaksanaan sidang, dilakukan riset kecil oleh lima kantor cabang ISEI yakni cabang Bandung, Bali, Makassar, Yogyakarta dan Padang. Riset menghasilkan bahan dasar bagi penyusunan usulan kebijakan ISEI kepada pemerintah terkait upaya revitalisasi peran UMKM dalam menggerakkan perekonomian nasional. Dalam wawancara, Aviliani, mantan Sekretaris Umum semasa Darmin, mengatakan bahwa pemilihan topik riset, yang kemudian diangkat sebagai topik sidang pleno tersebut, merupakan inisiatif ISEI di daerah yang didukung dan dibiayai pengurus pusat. Artinya, relasi pusat dan daerah bekerja efektif.



Tempo

■ *Darmin Nasution mendampingi presiden menerima kunjungan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rusia di Istana Merdeka, Jakarta (2016)*

Agar lebih memahami kedudukan UMKM dalam perekonomian nasional, di sini dikutip salah satu makalah Sidang Pleno yang ditulis oleh Prasetyono Malang Joedo, Deputy Bappenas, bertajuk “Peran UMKM Sebagai Penggerak Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Dalam Era Globalisasi dan Desentralisasi.” Antara lain disebutkan bahwa sektor UMKM merupakan sumber daya nasional; perannya dapat didorong sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi dan peningkatan ketahanan ekonomi nasional karena UMKM lebih banyak mengolah dan memanfaatkan sumber daya lokal.

Keberadaan UMKM di berbagai daerah mampu menjadi sumber penyedia kebutuhan dasar dan lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Oleh karena itu, pemberdayaan sektor UMKM selalu disinergikan dalam program penanggulangan kemiskinan

Suara-suara dari Kongres

Pada 2015, ISEI menyelenggarakan Kongres XIX di Surabaya menandai babak akhir periode kedua kepemimpinan Darmin Nasution. Kongres bertema ‘Menghidupkan Kembali Sektor



Antara

Industri sebagai Penggerak Ekonomi Nasional' itu dibayang-bayangi situasi perekonomian nasional yang mengalami perlambatan cukup serius. Sejak krisis 1997/98 perekonomian Indonesia mengalami perubahan struktural dan, hingga 2015, belum pulih seperti sediakala. Selain itu, arus globalisasi-liberalisasi di seluruh bidang telah mewarnai kebijakan ekonomi di banyak negara termasuk Indonesia.

Dalam lingkup regional, Masyarakat Ekonomi ASEAN akan segera berlaku efektif. Ironisnya, kondisi perekonomian nasional justru mengalami kelesuan terutama dalam sektor industri

manufaktur yang seharusnya menjadi penggerak perekonomian nasional. Dikhawatirkan akan berdampak pada hilangnya daya saing Indonesia di ranah industri khususnya yang bersifat padat karya. Persoalan terkait sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kapasitas institusi ekonomi dan berbagai persoalan lain masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dipecahkan.

Sesuai dengan tema besar kongres, seminar merekomendasikan strategi dan reformasi pembangunan industri guna mendorong pembangunan nasional. Seminar juga membahas

Wakil Presiden Jusuf Kalla membuka seminar nasional dalam rangka perayaan ulang tahun ke-53 Kemenko Perekonomian dengan mengusung tema "Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju" di Jakarta (2019). Pada saat itu, Darmin Nasution menjabat sebagai Menko Perekonomian.

Darmin Nasution sebagai Gubernur BI menjabat hangat Perry Warjiyo yang diangkat sebagai Deputy Gubernur (2013).



Tempo

kerangka kebijakan makro yang dapat mendukung revitalisasi sektor industri agar mampu mendorong langkah-langkah penguatan peran sektor industri dalam perekonomian nasional.

Seperti kongres sebelumnya, pengurus pusat ISEI bersama pengurus cabang melakukan penelitian pendahuluan sebagai kajian rekomendasi bagi pengembangan sektor industri lokal. ISEI Cabang Medan meneliti tentang industri berbasis minyak sawit di Sumatra Utara; ISEI Cabang Palembang memilih topik memperkuat industri songket Sumatra

Selatan. Selanjutnya, ISEI Cabang Jember meneliti pengembangan industri kakao Kota Jember; ISEI Cabang Banjarmasin meneliti pengembangan pusat industri perikanan Kota Baru, Kalimantan Selatan; dan ISEI Cabang Kendari meneliti mengenai pengembangan industri pengolahan nikel di wilayah Sulawesi Tenggara.

Dalam sambutan pembukaan Kongres, Ketua Umum ISEI Darmin Nasution menggarisbawahi soal sektor industri manufaktur yang belum pulih dan belum kembali memainkan perannya. Alih-alih menjadi motor penggerak, peran sektor ini

selalu berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional; artinya terus menurun. Sementara itu, berbagai kegiatan eksploitasi dan ekspor hasil mineral dan batubara dan perkebunan justru mulai menggeliat terutama di luar Jawa. Di sisi lain, konsumerisme masyarakat Indonesia cukup tinggi dibanding negara lain di kawasan yang sama. Menurut Darmin, gabungan dinamika konsumsi masyarakat dan ekspor terbentuk menjadi pijakan utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Darmin menilai bahwa tema seminar dalam Kongres tepat karena bersamaan waktunya dengan tahun pertama mandat yang diemban oleh pemerintahan baru. Selain itu, berhubung situasi ekonomi nasional yang tengah berada dalam lingkungan ekonomi dunia yang belum sehat, perubahan orientasi kebijakan seyogianya dikaitkan dengan kerangka kebijakan moneter dan fiskal.

Menko Perekonomian Darmin Nasution didampingi sejumlah menteri memberikan keterangan pers mengenai akan dilakukannya deregulasi sejumlah peraturan di tahun 2015.





Antara

Menko Perekonomian Darmin Nasution meninjau lokasi produksi aluminium dalam rangka mendukung industri otomotif nasional (2019).

Ditemukan sejumlah fakta dan pokok masalah. Antara lain, kontribusi manufaktur terhadap PDB nasional masih lebih tinggi daripada sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran, namun persentasenya terus menurun. Selain itu, peranan industri manufaktur dalam perekonomian Indonesia menjadi isu penting karena menjadi penggerak utama perekonomian nasional, penyerapan tenaga kerja dan pengurangan angka pengangguran serta penghasil devisa.

Permasalahan yang dihadapi ialah ketertinggalan integrasi industri manufaktur ke dalam jaringan produksi global; lemahnya keterkaitan industri hulu-hilir; lemahnya perdagangan antardaerah; terbatasnya insentif pemerintah untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur;

kurangnya pelatihan keterampilan tenaga kerja, ketersediaan lembaga pembiayaan khusus industri manufaktur; kesenjangan tabungan investasi karena rendahnya mobilisasi dana masyarakat dan kesiapan birokrasi dalam rangka investasi industri.

Kongres XIX di Surabaya merupakan program kerja terakhir kepengurusan Darmin Nasution. Dalam pemilihan ketua umum pada kongres itu, Muliaman Darmansyah Hadad, kala itu Ketua Harian, “naik” menjadi ketua umum yang baru menggantikan Darmin—yang selanjutnya dilantik menjadi Menteri Koordinator Perekonomian dalam Kabinet Kerja



Kompas

Wakil Presiden Budiono didampingi Sri Sultan Hamengku Buwono X dan Ketua Umum ISEI Darmin Nasution dalam Kongres XVIII ISEI di Yogyakarta (2012). Kongres membahas masalah otonomi daerah.



Tempo

■ Darmin Nasution didampingi para Deputi Gubernur, Muliaman Hadad berinteraksi dengan media se usai rapat Dewan Gubernur BI (2011).

Pelantikan Gubernur

Instansi Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI)

Cabang Surakarta

Periode Tahun 2000-2011

Surabaya

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

Logo of various banks and institutions including BINA NIGA, UOB Buaran, and BTN.



5

MENINGKATKAN PERAN ORGANISASI

Menjadikan ISEI platform lintas-pemikiran. Muliaman Hadad membuka luas ruang wacana.

Sewaktu sekolah dasar di Bekasi, Muliaman Darmansyah Hadad pernah lompat kelas mendahului teman-temannya. Tak heran jika di kalangan teman seangkatannya di FEUI kemudian, ia pun dikenal sebagai “manusia paling cepat”—paling cepat menangkap materi pelajaran di kelas, paling cepat menjawab soal dan, karena itu, paling cepat lulus kuliah. Ia lulus sesuai dengan masa studi yang ditetapkan universitas (1979–84). Juga pada waktu studi lanjutan di Harvard University, cukup satu tahun ia raih gelar Master of Public Administration (1990–91); dan tepat lima tahun berikutnya (1991–96) ia petik Doktor ilmu ekonomi dari Monash University, Melbourne, Australia.

Terpilihnya Muliaman Hadad sebagai Ketua Umum ISEI menambah “tanda baru” dalam kepemimpinan organisasi itu. Ia mengawali tampilnya ekonom terdidik dari Benua Selatan



Koleksi ISEI Pusat

Muliaman D. Hadad,
Ketua Umum 2015-18

dalam kepengurusan ISEI setelah sebelumnya banyak diampu para jauhari lulusan perguruan Eropa Barat dan Amerika Serikat. Secara sosio-kultural, Australia tergolong Barat, tapi geografis dekat dengan Indonesia. Itu sebabnya dalam kajian ilmu ekonomi terkesan ada sentuhan “regio-relasional” khusus antara Indonesia dan Australia. Sejumlah Indonesianis asal Australia setia menjadi penyigi andal ekonomi Indonesia. Pada 1960, Profesor H. W. Arndt dari Australian National University berinisiatif menerbitkan jurnal ilmiah *Bulletin of Indonesian Economic Studies* yang dikenal baik dan masih beredar hingga kini.

Berselang dua tahun setelah lulus sarjana, Muliaman Hadad bekerja sebagai staf umum di BI kantor perwakilan Mataram (1986). Selanjutnya, di bank sentral itu, Muliaman mencapai jenjang jabatan tertinggi sebagai

■ Gubernur Bank Indonesia, Boediono, didampingi Deputy Gubernur BI Muliaman D. Hadad saat jumpa pers (2019)

Deputi Gubernur (2006–11); kemudian terpilih sebagai Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (2012–17). Baru setahun di kursi OJK, Muliaman ditunjuk mewakili negara menjadi Duta Besar di Swiss dan Liechtenstein pada 2018—jabatan di luar minat profesionalnya

dalam perbankan, perencanaan strategis dan transformasi organisasi. Namun, tak diragukan, ia mampu mengemban tugas itu hingga selesai pada 2023, dan selanjutnya menjabat Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia.



Keterlibatan Muliaman Hadad dalam kepengurusan ISEI diawali sebagai Sekretaris Umum pada 2005 di bawah Ketua Umum Burhanuddin Abdullah. Kemudian, ia jabat Ketua Harian semasa dua periode kepemimpinan Darmin Nasution. Maka, hal yang wajar bila kemudian Muliaman terpilih menjadi Ketua Umum melalui Kongres XIX ISEI di Surabaya pada 2015. Dengan demikian, Muliaman merupakan ketua umum kedua belas sejak ISEI didirikan.

Membuka Lebar Forum

Menjawab pertanyaan wartawan, setelah terpilih, Muliaman mengatakan bahwa ia akan meningkatkan peran ISEI sebagai organisasi untuk menyalurkan pemikiran para ekonom nasional. Makna kenasionalan itu tentu saja mencakup mereka yang berada di daerah. Untuk meningkatkan peran itu, ia ingin lebih mendorong agar cabang ISEI di daerah, bersama pusat, banyak melakukan penelitian dan pengkajian permasalahan ekonomi tanah air. Seluruh *resources*, katanya, dimobilisasi karena

Memukul komping pembukaan seminar nasional ISEI di Pekanbaru, Riau (2017). Seminar nasional bertujuan mencari model kerjasama program tanggung jawab sosial perusahaan yang berkesinambungan guna mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan dalam mewujudkan ekonomi yang berkeadilan.



Antara

Muliaman D. Hadad memberi ceramah di acara silaturahmi Bsinis Indonesia Group.

tugas tersebut bukan monopoli pengurus ISEI Pusat. Ia juga menggagas perlunya bersinergi dengan asosiasi profesi yang lain agar diperoleh masukan lebih komprehensif.

Di sisi lain, Muliaman Hadad mendorong ISEI meningkatkan relasi simbiosis dengan pemerintah atau mitra pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan gagasan ekonomi agar bisa dimanfaatkan secara konstruktif. Dalam rangka itu, pada masa kepengurusan Muliaman, ISEI sempat melakukan audiensi dengan Presiden, dilanjutkan dialog publik dan silaturahmi dengan Presiden pada 2016.



Bisnis

Begitu pula kerja sama dengan kementerian dan lembaga pemerintah lain dilaksanakan dalam bentuk seminar, dialog, dan forum serupa lainnya.

Dalam wawancara dengan tim penulis buku ini, Muliaman menggambarkan ISEI semacam *platform* yang berfungsi sebagai “tangki” lintas-pemikiran. Ia telah membuktikan metaforanya itu dengan pelbagai kegiatan ISEI yang membuka bermacam forum wicara selebar-lebarnya. Di luar kongres dan sidang pleno sebagai agenda rutin, ISEI selama tiga tahun dipimpin Muliaman menggelar total 22 kali seminar berskala nasional dan internasional/regional; belasan kali diskusi publik dan diskusi kelompok terpumpun; dan sepuluh kali *workshop* atau pelatihan. Selain itu, ada kegiatan serupa berbentuk sarasehan, dialog, pidato publik, *weekly lecture* dan bedah buku.

Yang baru dari masa kepengurusan Muliaman Hadad ialah program *talkshow* televisi ‘Economics Lounge with ISEI’ yang diasuh oleh Aviliani dengan mengundang narasumber andal di bidangnya. Mengunggah topik-topik aktual pada masanya, acara itu bagaikan pelita yang menyuluh masyarakat untuk memahami ihwal perekonomian negeri. Dalam salah satu siaran awal 2018, umpamanya, diangkat tentang “impian” Indonesia menjadi poros ekonomi maritim dunia dan apa nilai tambahnya bagi nelayan. Pada kesempatan lain, dibicarakan masalah pengelolaan dana desa, pengendalian harga pasar, kelemahan industri, dan lain-lain. Tak lupa, publik diingatkan soal kemungkinan ancaman “pemain asing” dalam ekonomi digital yang tengah bertiup kencang.



Tempo

Tidak genap satu periode Muliaman Hadad memimpin ISEI karena ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Duta Besar di Swiss dan Liechtenstein—seperti telah disebutkan—berselang lima bulan sebelum kepengurusannya berakhir. Untuk mengisi kekosongan pimpinan itu, Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro, Menteri Program Perencanaan Nasional/Ketua Bappenas, menggantikannya sebagai Pelaksana Ketua Umum.

Sekembali dari studi Doktor di University of Illinois, Amerika Serikat, Bambang Brodjonegoro

kembali ke kampus Salemba sebagai pengajar. Tak sampai sepuluh tahun kemudian, pada 2006, ia diangkat sebagai guru besar dalam usia akademis terhitung muda (40 tahun). Setelah berbakti kepada almamaternya sebagai Dekan (2005–09), kiprah Bambang Brodjonegoro tercurah dalam birokrasi pemerintahan. Ia diangkat sebagai Wakil Menteri Keuangan dalam kabinet terakhir Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2013–14); kemudian Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja. Dua tahun berikutnya bergeser menjadi Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas

■ *Presiden Joko Widodo bersama Ketua Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Muliaman D. Hadad dalam acara Dialog Publik ISEI di Balai Kartini, Jakarta (2016)*

Bedah buku Muliaman Hadad, sebagai ketua Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, bertajuk *Sustainable Financing* (2015). Dari kiri ke kanan: Armida Alisjahbana, Aviliani, Emil Salim; Muliaman Hadad; dan A. Prasetiyantoko. Bedah buku ini merupakan rangkaian kegiatan pelantikan pengurus pusat ISEI.

(2016–19). Terakhir, sebagai Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (2019–21).

Memperkuat Produktivitas

Selain menggelar berbagai kegiatan yang telah disusun semasa kepemimpinan Muliaman Hadad, sisa waktu lima bulan dimanfaatkan Bambang Brodjonegoro untuk menyiapkan kongres. Kota Bandung dipilih sebagai tempat perhelatan Kongres XX ISEI pada 8–10 Agustus

2018. Kebetulan ISEI Cabang Bandung termasuk salah satu tim penelitian ilmiah terbatas—bersama-sama cabang Pontianak, Bengkulu dan Manado—yang hasilnya dilaporkan dalam kongres.

Kongres di Bandung bertema ‘Memperkuat Produktivitas Perekonomian: Harmonisasi Sektor Formal dan Informal’. Pilihan atas tema itu, seturut panitia, didasarkan pada pertimbangan bahwa ekonomi Indonesia yang, sebenarnya, telah berada pada alur pertumbuhan menuju industrialisasi, terpukul



Antara

oleh krisis Asia (1997). Dampaknya, terjadi stagnasi dalam perkembangan ekonomi nasional; pertumbuhan sektor industri manufaktur rendah, perkembangan sektor jasa juga berada pada tingkat keterampilan yang bermutu rendah. Krisis tersebut menurunkan kemampuan Indonesia berinvestasi dalam sumber daya fisik dan sumber daya manusia serta teknologi. Akibat lanjutannya, daya saing perekonomian Indonesia menjadi relatif rendah dibanding dengan negara-negara lain.

Dalam pidato sambutan pembukaan kongres, Pelaksana Ketua Umum ISEI menengarai bahwa produktivitas perekonomian nasional belum optimal dan belum efisien sehingga perlu strategi lebih progresif untuk meningkatkannya serta mendorong pekerja lebih produktif.

Peran pemerintah sebagai regulator harus mampu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi kebijakan serta sinergi dan kolaborasi dalam implementasi. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan antara lain melalui pergeseran dari sektor informal ke sektor formal untuk menjamin efisiensi industri dan peningkatan produktivitas. Usaha kecil atau menengah yang berdiri sendiri, sebagai contoh kasus, akan sulit mencapai skala ekonomi karena tingginya biaya-biaya yang dihadapi.

Pelaksana Ketua Umum juga menekankan bahwa Indonesia harus mampu mentransformasikan kekuatan sosial-ekonominya dari yang berbasis sumber daya alam ke basis sumber daya manusia, terutama sehubungan dengan menyongsong era Indonesia Emas 2045.

Acara 'Economic Lounge with ISEI' di JakTV, dipandu Aviliani.



Youtube/JakTV Official Channel

Atas: Muliaman Hadad menjadi duta besar, Bambang Soemantri Brodjonegoro menggantikan sebagai Pelaksana Ketua ISEI (2018).



Tempo

Bawah: Muliaman Hadad mendampingi Ratu Maxima dari Negeri Belanda dalam Indonesia Fintech Festival & Conference (2016)



Tempo



Atas: Muliaman D. Hadad, Chatib Basri, dan Agus D.W. Martowardojo seusai membahas perkembangan sistem keuangan terkini dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK) di Kementerian Keuangan, Jakarta (2014)

Bawah: Presiden Joko Widodo didampingi Darmin Nasution, Sri Mulyani Indrawati, dan Muliaman D. Hadad, melakukan pertemuan awal tahun dengan para pelaku usaha industri jasa keuangan di Istana Negara, Jakarta (2016).

Tempo



Tempo



Antara

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyampaikan sambutan saat membuka Seminar Nasional dan Kongres ISEI XX di Bandung (2018). Kongres tersebut mengangkat tema Memperkuat Produktivitas Perekonomian Indonesia: Harmonisasi Sektor Formal dan Informal.

Dalam hal ini, transformasi merupakan transisi dari ekonomi produktivitas rendah yang padat karya menjadi ekonomi produktivitas tinggi padat keterampilan. Kekuatan yang mendorong transformasi struktural itu ialah terjadinya perubahan produktivitas pada sektor modern yakni industri dan jasa.

Sementara itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla yang hadir meresmikan pembukaan Kongres menyatakan bahwa peningkatan produktivitas tergantung pada banyak faktor seperti teknologi, sistem, manajerial, manusia, modal, dan sebagainya. Di antara faktor-faktor itu, walaupun bukan seluruhnya, menurut Wakil Presiden, belum mendapat perhatian sewajarnya dan karena itu perlu perbaikan dalam kebijakan ataupun pengelolaannya. Dengan

nada optimistis, ia mengatakan bahwa peluang peningkatan produktivitas perekonomian nasional masih terbuka dan “mudah” dilakukan. Yang sulit, kata pengurus ISEI terlama itu (menurutnya sejak 1970-an), jika peluang dan kemungkinan peningkatan itu tipis atau nihil sama sekali.

Dengan menyelenggarakan Kongres XX, Bambang Brodjonegoro telah menyambung sekaligus mengakhiri masa kepengurusan ISEI periode 2015–18 yang diawali oleh Muliaman Hadad. Kongres itu sendiri, seperti telah diagendakan, memilih ketua umum baru untuk periode kepengurusan selanjutnya. Terpilih sebagai pemimpin baru ISEI adalah Perry Warjiyo, saat itu Gubernur Bank Indonesia.





6

MENITI ARUS GLOBALISASI

Pada era globalisasi, ISEI harus memperkuat diri. Sosok Perry Warjiyo dipandang tepat menjawab tantangan baru.

Menjamu makan malam peserta Kongres ISEI di Bandung (2018), Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyatakan bahwa belajar dari pengalaman sejak didirikan puluhan tahun lalu, ISEI harus memperkuat diri. Ia memberi tiga kunci bagi penguatan organisasi itu. Pertama, ISEI akan kuat bilamana mampu dan konsisten berkontribusi nyata dalam memecahkan permasalahan ekonomi negeri serta ikut merumuskan kebijakan penanggulangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Kunci kedua, menjaga dan meningkatkan kualitas riset dan publikasi yang mampu menjawab berbagai tantangan ke depan. Erat kaitannya dengan itu, ISEI bisa “masuk” kampus mendorong anggotanya sebagai dosen tamu untuk mengajarkan pengalaman konkret di lapangan atau *best practices* kepada mahasiswa sehingga diperoleh pemahaman terhadap permasalahan secara komprehensif. Ketiga, ISEI



Istimewa

hendaknya mampu menjalin kerja sama dan sinergi dengan lembaga profesi/keilmuan yang lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Pernyataan bernas yang disampaikan Perry Warjiyo dalam acara *dinner talk* tersebut tampaknya “berbuntut panjang.” Oleh peserta kongres, ia didaulat menjadi Ketua Umum ISEI periode selanjutnya. Penilaian umum yang beredar dalam kongres mengisyaratkan bahwa ia dipandang sebagai sosok paling tepat untuk membawa ISEI memasuki dinamika global yang kian pesat. Hal itu mengingatkan pada pertimbangan Presiden Joko Widodo ketika memilih Perry Warjiyo sebagai Gubernur Bank Indonesia selang beberapa bulan sebelum pelaksanaan Kongres ISEI. Dalam situasi kegentingan global, kata Presiden, “kita harus menempatkan orang yang memiliki rekam jejak, jam terbang yang tinggi dan pengalaman yang tinggi.”

■ Perry Warjiyo, Ketua Umum, 2018 – 2027.

Jusuf Kalla, Bambang Brodjonegoro, Darmin Nasution, Perry Warjiyo, Wimboh Santoso, M Iriawan, bersiap untuk membuka Seminar Nasional dan Kongres XX di Bandung (2018).

Sementara itu, masih dalam acara *dinner talk* tersebut, Perry Warjiyo telah memberi catatan tentang arah perekonomian Indonesia mendatang. Tantangan utama perekonomian Indonesia pada 2030, ungkapnya, adalah memastikan Indonesia terhindar dari *middle income trap* alias jebakan sebagai negara berpendapatan menengah. Sebaliknya, perlu dicermati kondisi ekonomi, potensi dan tantangan untuk merencanakan berbagai pilihan kebijakan guna mentransformasikan Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi.

Pilihan Presiden atas Perry Warjiyo terbukti sangat tepat. Bahkan ia kemudian diangkat kembali sebagai Gubernur BI untuk kedua kalinya pada 2023. Begitu pula, setahun sebelumnya, ia didaulat kembali mengemudikan ISEI untuk kedua kalinya pada 2022. Semua itu membuktikan terpenuhinya kualifikasi prima pada pria asal Sukoharjo, Jawa Tengah, itu sebagai seorang pemimpin.



Antara

Karier dan Reputasi

Setelah lulus dari sekolah menengah di Solo, Perry sebenarnya ingin kuliah kedokteran. Akan tetapi, karena uang pendaftaran yang diberikan oleh ibunya kala itu cuma tiga puluh lima ribu rupiah—tidak cukup untuk mendaftar di fakultas kedokteran—ia pun mengalihkan pilihan studinya ke fakultas ekonomi di Universitas Gadjah Mada. Ia lulus dari kampus Bulaksumur itu pada 1982—membuktikan bahwa pilihan kuliahnya itu bukan sekadar “pengalihan” dari

minat awalnya. Terbukti pula, ia melanjutkan pendidikan di Iowa State University, Amerika Serikat, hingga menyabet gelar Master dalam ekonomi moneter dan internasional (1989). Tanpa beringsut dari kampus itu, ia melaju ke jenjang Doktor yang diraihinya pada 1991.

Perry Warjiyo mengawali karier kekaryaan di Bank Indonesia sebagai staf *desk* penyelamatan kredit, urusan pemeriksaan dan pengawasan kredit, hingga diangkat menjadi Staf Gubernur Bank Indonesia (1992–95). Pada 1998 ia diangkat

■ Suasana Sidang Pleno ISEI XX di Bali tahun 2019. Sidang mengangkat tema ekonomi digital sebagai tantangan pertumbuhan nasional di masa mendatang.

Koleksi ISEI



Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersama Deputi Gubernur BI, Erwin Rijanto dan Mirza Adityaswara, melakukan konferensi pers usai rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia di gedung BI, Jakarta (2019).



Tempo

menjadi Kepala Biro Gubernur dan pada 2001 memegang tongkat *project leader* Unit Khusus Program Transformasi. Selanjutnya, pada 2003 ia menjabat Direktur Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan hingga 2005 saat ia diangkat menjadi Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia hingga 2007. Di jajaran pucuk pimpinan Bank Indonesia, Perry Warjiyo menduduki kursi Deputi Gubernur (2013–18), kemudian, puncaknya, Gubernur dua kali masa jabatan (2018–23 dan 2023–28).

Minat akademis Perry Warjiyo tampaknya tidak berhenti setelah ia lulus dari kampus. Sejak awal berkarier sebagai bankir profesional, ia tetap menggeluti riset khususnya dalam ekonomi

dan moneter, isu-isu internasional, transformasi organisasi dan strategi kebijakan moneter; begitu pula ia tetap mengarahkan perhatian pada pendidikan dan riset kebanksentralan. Sejumlah buku dan artikel jurnal lahir dari kreativitasnya, antara lain *Central Bank Policy Mix: Issues, Challenges, and Policy Responses* (2020), *Kebijakan Bank Sentral: Teori dan Praktik* (2016), dan *Kebijakan Moneter di Indonesia* (2003).

Tidak hanya berkiprah di dalam negeri, pada tataran internasional, Perry Warjiyo pernah duduk sebagai Direktur Eksekutif Southeast Asia Voting Group IMF (2007–09); Ketua Asian Consultative Council, Bank International Settlement; Ketua



Tempo

Budiono memberikan ucapan selamat kepada Perry Warjiyo setelah acara pelantikan Gubernur BI di gedung Mahkamah Agung, Jakarta (2018).

Executive Committee Islamic Financial Service Board, dan lain-lain. Sering memimpin delegasi Bank Indonesia ataupun mewakili Indonesia dalam berbagai event internasional, termasuk dalam pertemuan Presidensi G-20 Indonesia di Denpasar, Bali, bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Di bawah kepemimpinan Gubernur Perry Warjiyo, Bank Indonesia meraih sejumlah penghargaan penting, antara lain The Best Central Bank of the Year dari Global Islamic Finance Awards (2018, 2019); Best Asset Owner in Southeast Asia

dalam Institutional Excellence Award dari Asian Investor (2022); dan The Best Macroeconomic Regulator in Asia Pacific dari The Asian Bankers (2020). Sebaliknya, Gubernur Perry Warjiyo pun menjadi “langganan” berbagai penghargaan seperti Governor of the Year se-Asia Pasifik dari Media Global Markets (2019); Anugerah Hamengkubuwono IX dari Universitas Gadjah Mada (2022); Tokoh Syariah ASR 2019 dari Anugerah Syariah Republika (2019); Pemimpin Terpopuler dalam Media Pemberitaan Online 2023 dari Indonesia Government Awards, dan lain-lain.

Perry Warjiyo membuka Sidang Pleno ISEI XXII dan Seminar Nasional di Semarang .



Koleksi ISEI

Melangkah ke Depan

Ketika menyambut keterpilihannya sebagai Ketua Umum ISEI 2018–21, Perry Warjiyo mengawali dengan berdoa semoga ISEI mampu berperan memajukan perekonomian Indonesia. Begitu pula saat melantik Pengurus Pusat (21 September 2018), ia berharap, pengurus baru dapat memperkuat sinergi keanggotaan baik di pusat maupun daerah sehingga dapat mengerahkan segenap gagasan dan energi untuk memecahkan masalah perekonomian bangsa.

Ke mana arah organisasi akan dilayarkan, Perry Warjiyo, seperti ketika menjamu makan malam peserta Kongres ISEI di Bandung, menegaskan

akan memperkuat sinergi dengan berbagai lembaga di dalam ataupun di luar negeri untuk berkontribusi nyata memajukan perekonomian Indonesia melalui tiga pilar. Ketiga pilar itu ialah penguatan peran serta ISEI dalam perumusan kebijakan pemerintah, peningkatan kualitas akademis dan riset perguruan tinggi serta penguatan kerja sama ISEI dengan lembaga profesi lain di tingkat nasional dan internasional. Ia menegaskan, peran aktif organisasi profesi diperlukan untuk mewujudkan target Indonesia sebagai negara berpenghasilan tinggi pada 2045.



Koleksi ISEI

Pembukaan Sidang Pleno ISEI XXII di Semarang. Mengiringi Perry Warjiyo, turut hadir Ganjar Pranowo (kala itu Gubernur Jawa Tengah), dan Destry Damayanti (Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia).

Pernyataan Ketua Umum ISEI tersebut menyiratkan kesadaran bahwa organisasi yang dikemudikannya bakal menghadapi tantangan yang tak ringan di era globalisasi. Tantangan utamanya berkaitan dengan dinamika perekonomian era digital. Untuk menjawab tantangan itu, ISEI menggelar Sidang Pleno XX dan Seminar Nasional dengan tema 'Menavigasi Era Digital: Tantangan dan Strategi Mengawal Stabilitas dan Mendorong Momentum Pertumbuhan Ekonomi Nasional' di Denpasar, Bali (27–28 Agustus 2019). Sidang Pleno XX ISEI dan Seminar Nasional dihadiri oleh sekitar 600 orang yang terdiri dari pengurus dan anggota dari 52 Cabang ISEI dengan komposisi akademisi, pebisnis dan pemerintah.

Dalam sambutannya pada Sidang Pleno tersebut, Ketua Umum Perry Warjiyo menyatakan bahwa ISEI akan mengusung sejumlah strategi kebijakan baik dalam sisi permintaan, penawaran dan reformasi struktural, selain pengembangan potensi ekonomi digital sebagai sumbangsih pemikiran ekonomiwan kepada pemerintah. Penyelenggaraan Sidang Pleno disesuaikan dengan kompleksitas tantangan yang tengah dihadapi perekonomian nasional, baik dalam perspektif jangka pendek, menengah-panjang maupun perspektif permasalahan ke depan terkait dengan kemampuan Indonesia dalam menavigasi era digital.



Antara

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersama Gubernur Bank Sentral lainnya di ASEAN, antara lain Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina dan Vietnam di Jakarta. Bank Sentral Vietnam sepakat untuk bergabung dalam kerja sama konektivitas pembayaran di kawasan ASEAN.

Terdapat lima langkah strategis yang dirancang ISEI. Pertama, di bidang organisasi dan kelembagaan ISEI menyelesaikan amandemen Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang lebih terstruktur, terpadu dan menatap ke depan yang mengakomodasi perkembangan lingkungan strategis dan tantangan serta penguatan peran ISEI di pusat dan daerah. Kedua, Bidang Kajian dan Perumusan Kebijakan menyusun *white paper* sebagai sumbangsih

pemikiran ISEI bagi pemerintah terpilih untuk mendukung strategi kebijakan ekonomi nasional ke depan.

Ketiga, Bidang Pengembangan Akademi, Riset dan Profesi telah menerbitkan kembali *Jurnal Ekonomi Indonesia* yang memuat riset serta kajian akademis ekonomi sebagai kontribusi pemikiran anggota ISEI dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, bersama Menteri Riset,



Antara

Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Asosiasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Indonesia, ISEI meluncurkan Lembaga Akreditasi Mandiri untuk Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi (Lamemba).

Keempat, Bidang Kerja Sama Internasional telah memperluas kerja sama dengan lembaga internasional seperti IMF, World Bank dan Organization for Economic Cooperation and Development. Kelima, Bidang Kesekretariatan mengembangkan situs ISEI yang lebih representatif, interaktif dan proaktif yang bisa memuat berbagai kegiatan dan publikasi ISEI, selain pengembangan media sosial ISEI.

■ Kepala Perwakilan Bank Indonesia di Beijing Tutuk Setya Hadi Cahyono, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, dan Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan BI Donny Hutabarat tampil pada "courtesy meeting" mengenai Local Currency Settlement (LCS) dengan pimpinan bank Appointed Cross Currency Dealer (ACCD) dan pelaku usaha, dalam acara Indonesia-China Business Forum di Beijing, China (2023).

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo memberikan pemaparan secara daring saat kuliah umum atau Public Lecture G20 Kuliah umum yang diselenggarakan Bank Indonesia Institute (BINS) bersama Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Jawa Tengah dan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Jawa Tengah.

Kongres di tengah Pandemi

Di tengah situasi dan pertumbuhan ekonomi dunia yang tengah menurun akibat pandemi Covid-19, Pengurus Pusat ISEI menyelenggarakan Seminar Nasional dan Kongres XXI di Makassar (31 Agustus hingga 1 September 2021). Tema kongres ialah 'Peran ISEI dalam Penguatan Sinergi untuk Mengakselerasi Pemulihan Ekonomi Nasional di Era Digital'. Mengingat situasi dan kondisi masih dalam suasana pandemi, Kongres XXI diadakan secara virtual.

Menurut Anggito Abimanyu, Ketua Panitia Kongres, tema tersebut dipilih untuk menggambarkan kristalisasi pemikiran ISEI selama tiga tahun terakhir, selain untuk memperkuat sinergi dalam mendorong momentum pertumbuhan dengan menjaga stabilitas dan reformasi struktural perekonomian khususnya di tengah situasi pandemi Covid-19 serta perkembangan di era digital. Agenda penting kongres lainnya ialah pemilihan Ketua Umum Pengurus Pusat periode 2021–24. Kongres XXI diikuti oleh cabang ISEI yang aktif dan saat pelaksanaan kongres cabang ISEI berjumlah 52 cabang.



Antara



Antara

Menurut Ketua Panitia Pengarah yang juga Sekretaris Umum Pengurus Pusat ISEI Solikin M. Juhro, Kongres XXI juga bertujuan meningkatkan silaturahmi antar-anggota dan pengurus ISEI serta memperkuat basis pengelolaan organisasi, di samping meningkatkan peran aktif ISEI dalam mendorong kapabilitas akademis dan riset di perguruan tinggi. Terkait dengan situasi ekonomi di tengah merebaknya pandemi, Kongres XXI ISEI diharapkan dapat mendorong peran serta ISEI dalam perumusan kebijakan untuk menjawab berbagai tantangan ekonomi nasional. Di antara pembicara yang hadir dalam seminar tersebut adalah Menteri

Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri M. Arsjad Rasjid yang dilanjutkan dengan pemaparan karya-karya ilmiah peserta seminar nasional dan disiarkan secara virtual.

Presiden Joko Widodo yang menyampaikan sambutan secara virtual dalam pembukaan Kongres berharap agar ISEI mampu menjadikan kondisi perekonomian nasional dan global yang membaik sebagai momentum untuk bersama-sama melakukan percepatan transformasi ekonomi.

■ Perry Warjiyo hadir di tengah pembukaan BNI Investor Daily Summit 2023.



Antara

■ Ma'ruf Amin, Perry Warjiyo (kiri), Teten Masduki menyalakan lentera saat membuka Indonesia Sharia Economic Festival (ISEF) 2023 di Jakarta Convention Center, Jakarta (2023)

"Percepatan transformasi ekonomi membutuhkan sinergi berbagai pihak. Melalui Kongres XXI ISEI ini, diharapkan lahir gagasan dan pemikiran-pemikiran maju untuk membantu bangsa dalam melalui masa-masa sulit pandemi Covid-19 ini," kata Presiden.

Lebih lanjut Presiden menekankan pentingnya digitalisasi untuk mendukung pemulihan ekonomi khususnya melalui penerapan *online single submission* (OSS) untuk menyederhanakan proses perizinan dalam membuka usaha di Indonesia. Digitalisasi menurutnya sangat penting untuk mendorong perekonomian

nasional dan daerah agar terus tumbuh. Melalui digitalisasi diharapkan membantu pengembangan badan usaha, termasuk milik petani, membuka akses pemasaran melalui kemitraan dan penyederhanaan akses pembiayaan.

Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Umum ISEI Perry Warjiyo menyampaikan rasa syukurnya bahwa sejak didirikan, ISEI telah berperan besar dalam memajukan ekonomi Indonesia dan selalu hadir dalam memberikan berbagai pemikiran atau rekomendasi kebijakan untuk mendukung pembangunan



Antara

ekonomi nasional yang berkualitas. Selama kepemimpinannya, ISEI berpartisipasi secara aktif melalui berbagai terobosan program maupun pemikiran dalam mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional serta mendorong kemajuan ekonomi Indonesia yang lebih inklusif ke depan. Menurutnya, hal tersebut sejalan dengan manifesto ISEI untuk mengambil peran positif guna kemajuan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan Ilmu Ekonomi dan menyampaikan pemikiran ekonomi yang sejalan dengan falsafah Pancasila.

Lebih lanjut Perry menjelaskan bahwa dalam satu dekade terakhir, telah terjadi perubahan global yang sangat dinamis yang meliputi *turbulence, uncertainty, novelty, ambiguity*.

la mengingatkan bahwa di tengah pesatnya peran teknologi digital dalam perekonomian global, yang dapat menyebabkan disrupsi dalam perekonomian jika tidak dikelola dengan baik, muncul krisis yang dahsyat akibat pandemi Covid-19 yang selama dua tahun belakangan telah memperlemah sendi-sendi perekonomian global dan nasional.

Selanjutnya Perry menuturkan terdapat tiga aspek penting yang perlu diperkuat untuk menghadapi peradaban baru akibat pandemi Covid-19. Pertama, digitalisasi. Akselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional menjadi *game-changer* selama pandemi, selain digitalisasi di berbagai bidang lainnya. Kedua, inklusi; diperlukan akselerasi inklusi ekonomi

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo bersama istri Wulandari Prasetyaningsih, dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Destry Damayanti mengamati perajin menyelesaikan pembuatan tenun songket asal Palembang saat pembukaan Pameran Karya Kreatif Indonesia di Jakarta (2022).



Koleksi ISEI

Rapat Umum Anggota & Rapat Kerja Lamemba di Bengkulu (2023).

dan keuangan yakni pada UMKM dan sektor pertanian terutama klusterisasi, kewirausahaan, akses pembiayaan dan digitalisasi. Ketiga, ekonomi hijau yang ditekankan untuk ramah lingkungan semakin intens sehingga perlu ditanggapi melalui kebijakan reformasi struktural dan digitalisasi.

Selain tiga aspek tersebut, Ketua Umum menyampaikan empat strategi pokok yang perlu dijadikan program konkret ISEI masa mendatang. Pertama, penguatan sinergi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kedua, penguatan strategi untuk mendorong inovasi dan implementasi kebijakan reformasi struktural untuk mencapai Indonesia Maju. Ketiga, percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan serta bidang-bidang lain seperti

pendidikan, kesehatan dan sosial secara menyeluruh. Keempat, mengoptimalkan program pemberdayaan pengurus dan anggota ISEI baik di pusat maupun daerah.

Memimpin Kembali

Melalui Kongres XXI ISEI, Perry Warjiyo kembali terpilih sebagai Ketua Umum periode 2021–24. Dalam temu pers (virtual) setelah keterpilihannya, ia menyatakan bahwa kepengurusan ISEI Pusat yang baru akan terdiri dari kalangan akademisi, bisnis dan pemerintahan. Ia menambahkan bahwa ke depan, ISEI akan melangkah sesuai dengan visi dan misi yang telah disetujui dan berharap makin bisa memberi kontribusi nyata terhadap kemajuan ekonomi melalui

rumusan kebijakan, akademis, pengembangan, profesionalisme, penguatan peran ISEI dalam perumusan kebijakan, selain berupaya meningkatkan kemampuan akademis daerah, nasional maupun global yang diikuti dengan penguatan organisasi.

Sebagai lanjutan kepemimpinannya sebelumnya, Perry Warjiyo akan fokus melanjutkan program

kebijakan yang mengacu pada empat strategi pokok. Pertama, penguatan sinergi untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Berkaitan itu, ISEI akan memberi rekomendasi kebijakan untuk membantu percepatan pemulihan ekonomi domestik. Kedua, penguatan strategi untuk mendorong inovasi dan implementasi kebijakan reformasi struktural untuk mencapai Indonesia Maju terutama

■ Lamemba mengadakan MoU Signing Ceremony di Jakarta.



Koleksi ISEI

Rapat Koordinasi PP ISEI
tahun 2024.

di sektor riil. Ketiga, percepatan digitalisasi ekonomi dan keuangan serta bidang-bidang lain seperti pendidikan, kesehatan dan sosial secara menyeluruh. Keempat, mengoptimalkan program pemberdayaan pengurus dan anggota ISEI baik di pusat maupun daerah melalui sejumlah kegiatan seperti *workshop*, seminar dan peningkatan koordinasi.

Dalam Kongres XXI ISEI Perry Warjiyo juga menyampaikan bahwa ISEI memiliki peran besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Capaian yang berhasil diraih ISEI dalam tiga tahun terakhir di antaranya amandemen dan penguatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang lebih terstruktur, terpadu dan menatap ke depan. Seiring dengan itu, ISEI bertransformasi secara menyeluruh dan lebih





Koleksi ISEI

inklusif baik dari segi organisasi, riset, kebijakan, akreditasi maupun kerja sama dalam dan luar negeri. Ia menambahkan bahwa ISEI mengambil peran aktif untuk kemajuan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan ilmu ekonomi dan menyampaikan pemikiran-pemikiran ekonomi yang sejalan dengan falsafah Pancasila. Selain itu, ISEI juga telah menerbitkan buku kajian kebijakan publik sebagai publikasi baru sebagai kontribusi pemikiran ISEI kepada pemerintah, baik pemikiran strategi utama maupun tematik untuk pemerintah pusat dan daerah.

“Di kota Surakarta (Solo), Jawa Tengah, ISEI menggelar Kongres XXII (19–20 September 2024) dengan tema ‘Memperkuat Fondasi Transformasi Ekonomi dan Kebijakan Publik yang Inklusif dan Berkelanjutan’. Agenda utama kongres ialah penyampaian laporan pertanggungjawaban kepengurusan periode 2021–24; seminar nasional; dan pemilihan ketua umum yang baru.

■ *Kongres ISEI XXII dan Seminar Nasional 2024 bertema Memperkuat Fondasi Transformasi Ekonomi dan Kebijakan Publik yang Inklusif dan Berkelanjutan. Acara dibuka oleh Presiden Joko Widodo.*



Koleksi ISEI

Kongres ISEI XXII, Perry Warjiyo terpilih kembali sebagai Ketua Umum ISEI untuk periode 2024 - 2027.

Kongres dibuka oleh Presiden Joko Widodo dan dihadiri sejumlah pejabat tinggi penting tingkat nasional dan daerah. Dalam amanatnya, Presiden menyatakan bahwa tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia tidak mudah antara lain karena situasi dunia yang diwarnai konflik seperti perang Rusia versus Ukraina serta situasi di Timur Tengah yang kian memanas dan berdampak pada melambatnya perekonomian.

Pada kongres ini, Perry Warjiyo kembali terpilih sebagai ketua umum ISEI. Dengan demikian, Perry akan melanjutkan tugas sebagai Ketua Umum ISEI periode ketiga dari 2024 hingga 2027."





HOME SWEET HOME

Inilah kantor pusat Ikatan Sarjana
Ekonomi Indonesia. Serasa di
rumah sendiri.

Rumah berukuran cukup besar itu terletak di Jalan Daksa 4/9, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Suasannya tenang di tengah pepohonan hijau yang berjajar di sekitarnya. Ada empat unit rumah setipe yang berdiri di ruas jalan yang tak terlalu panjang itu. Awalnya, rumah-rumah di kawasan elite itu merupakan rumah dinas milik Pertamina yang kemudian dijual kepada umum. Masing-masing bangunan berdiri di atas lahan sekitar 500 meter persegi, rumah-rumah itu memiliki halaman cukup luas yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang terbuka atau area parkir kendaraan.

Pada 1990, ISEI membeli salah satu rumah itu yang difungsikan sebagai kantor sekretariat Pengurus Pusat hingga kini. Rencana pembelian rumah itu diutarakan oleh J. B. Sumarlin tak lama setelah ia menjabat Ketua Umum ISEI pada 1987. Menurut Sumarlin, sebuah organisasi

semestinya memiliki kantor tetap milik sendiri. Sebuah kantor tetap, kata Sumarlin yang dituturkan kembali oleh Prijono Tjiptoherijanto (eks Sekretaris Umum kala itu), akan menambah kredibilitas organisasi. Tidak mungkin, Prijono mengutip Sumarlin lagi, berkas administrasi organisasi digotong kesana kemari hanya karena organisasi itu tidak memiliki kantor tetap.

Sebelum menempati kantornya sekarang, sekretariat ISEI Pusat bersifat "nomadik", berpindah-pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Pada masa-masa awal, kantor ISEI pernah numpang di sebuah ruangan di Kampus FEUI Salemba Raya karena faktor Sumitro Djojohadikusumo, sang pendiri, yang waktu itu dosen di kampus tersebut. Pernah pula pengurus ISEI berkantor di salah satu ruangan rumah direktur bank, lalu numpang (lagi) di sebuah ruangan di Kantor Bank Indonesia

Kanan: Kantor ISEI (Jalan
Daksa) "Rumah Besar"
ISEI Pusat di Jakarta



Istimewa



Kompas

semasa kepengurusan Arifin Siregar yang juga Gubernur Bank Indonesia saat itu (1983–88).

Semua cerita tentang “pengembaraan” kantor ISEI tersebut terasa samar-samar karena kurangnya informasi yang utuh. Achmad Kusnadi, staf umum kantor ISEI yang bergabung sejak 1986, mengingat lebih detail bahwa ISEI pernah berkantor di rumah Abdul Gani, Direktur Bank Duta waktu itu, di Jalan Besuki, Menteng, Jakarta Pusat. Dari Pak Direktur inilah diperoleh informasi bahwa ada

rumah dinas Pertamina di daerah Kebayoran Baru yang hendak dijual kepada umum. Prijono menindaklanjuti informasi itu hingga mengurus proses pembelian rumah tersebut.

Sebelum membeli rumah tersebut, cerita Kusnadi lagi, kantor ISEI masih lanjut berpindah-pindah; bergabung di kantor redaksi majalah Infobank di Jalan Hasanuddin, Kebayoran Baru. Dari kantor majalah itu, ISEI boyong lagi ke sebuah ruko di Jalan Fatmawati yang disewa majalah Forum Ekonomi yang dipimpin oleh

■ *Salam hangat Sumarlin dan Sumitro sewaktu peresmian sekretariat ISEI di jalan Daksa IV no. 9*



Kompas

■ Sumitro Djojohadikusumo, pendiri ISEI (kanan), "bertamu" di Kantor ISEI bersua Ketua Umum J. B. Sumarlin.

Arifin Siregar (Ketua Umum 1979–87), dan Prijono salah seorang redaktornya. Barulah, sejak 1990, ISEI menetap di rumah yang dibeli di Jalan Daksa itu hingga kini.

Setelah dibeli, eks rumah dinas Pertamina itu direnovasi pada beberapa bagian; dan pada 2013 praktis dibangun kembali pada masa kepemimpinan Darmin Nasution (2009–15). Jika semula berwujud rumah tapak satu lantai, bangunan itu dirombak menjadi dua lantai, plus satu ruangan terbatas yang menjadi lantai

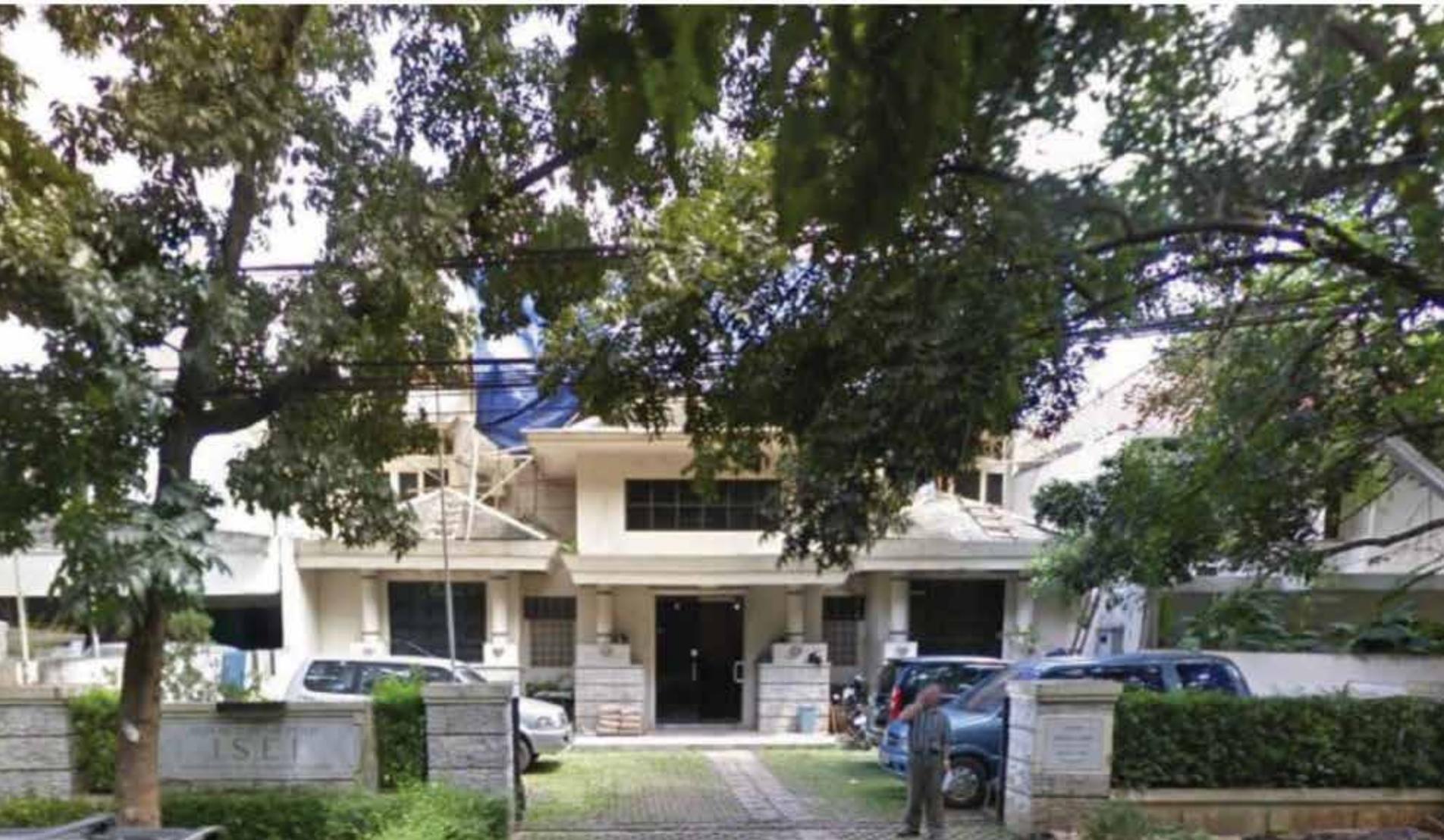
ketiga. Layaknya sebuah kantor, meski tetap tampil sebagai rumah, Sekretariat ISEI, di Lantai 1, dilengkapi *front office*, ruang tamu, ruang kerja ketua, ruang kerja sekretaris, ruang rapat kecil, musala, dapur, toilet dan kamar mandi-dalam. Di salah satu sudut Lantai 1, berkantor pula Pengurus ISEI Jakarta. Sedang di Lantai 2 terdapat ruang rapat besar, perpustakaan, ruang Indonesia Forum, dan sebuah ruang rehat bagi staf kantor. Tak jarang di antara staf itu bermalam di kantor.

Indonesia Forum yang menempati salah satu ruangan lantai atas merupakan ajang diskusi yang dibentuk semasa kepengurusan J. B. Sumarlin pada 1991. Secara rutin, forum itu membahas isu-isu strategis perekonomian yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan khususnya dalam bidang ekonomi. Didiskusikan, misalnya, tema-tema kongres atau sidang pleno ISEI, rancangan riset, lokakarya, dan sebagainya.

Indonesia Forum, jadinya, mewarnai Sekretariat ISEI bukan sekadar kantor, tapi juga sebuah “rumah untuk berpikir.”

Renovasi kantor ISEI rampung pada 2014, ditandai prasasti yang ditandatangani oleh Darmin Nasution (Ketua Umum) dan Aviliani (Sekretaris Umum). Menurut Aviliani, status rumah itu adalah Hak Guna Bangunan yang

■ Saat direnovasi tahun 2013



Istimewa

akan berakhir pada tahun 2038. Oleh karena itu, masih ada kemungkinan ISEI akan mencari bangunan yang memang diperuntukkan sebagai kantor; sedangkan kantor yang ditempati sekarang bisa digunakan untuk fungsi lain.

Kini, sehari-hari, kantor Sekretariat ISEI dikelola oleh sembilan orang, termasuk Sekretaris Eksekutif, Firman Sihol Parningotan, sekaligus

kepala kantor. Staf kantor lainnya mengurus sekretariat atau bagian umum, keuangan, rumah tangga, dan keamanan. Tentu tidak setiap hari pimpinan ISEI ngantor di Daksa tapi kantor itu tidak pernah sepi oleh tamu yang datang atau para staf yang bekerja. Layaknya lembaga profesional, ISEI (yang berbadan hukum sejak 2013) memberi gaji atau insentif yang layak bagi pengelola kantor sehari-hari.



Kunjungan di kantor Sekretariat ISEI ini berakhir di meja makan sekalian di ruang rapat kecil di lantai bawah. Sehari-hari, makan siang bagi kru kantor disiapkan oleh juru masak dengan memasak sendiri di dapur. Tradisi masak di kantor ini berawal dari Aviliani ketika menjadi Sekretaris Umum. Belanja bahan dilakukan

di Pasar Tulodong yang tak jauh dari kantor. Dengan masak sendiri, kerepotan makan siang pada jam istirahat, bisa diatasi. Sebagai bagian dari kawasan elite, harga makanan di sekitar kantor ISEI cukup mahal dan umumnya "bergaya resto."

Ruang Indonesia Forum
di Lantai 2



Istimewa



Istimewa

Peluncuran "Warta ISEI"
di ruang tengah (2024)

Menjelang tengah hari, Bu Ayu, juru masak kantor, telah menyiapkan makan siang bagi awak kantor dan tamu yang sedang rapat. Menyunya sederhana tapi cukup lengkap: ikan mas goreng, sambal terasi, tahu kuning goreng, lalapan, oseng-oseng sayuran, dan lain-lain, dan nasi putih tentu saja. "Masakan desa," kata Bu Ayu. Ia merendah karena "masakan desa" yang ia racik tentulah punya nilai tersendiri. Makan siang berlangsung beramai-ramai dengan lahap.

Hal-hal begini membuat Sekretariat ISEI mengesankan tetap merupakan sebuah rumah bersuasana ramah di antara kesibukan kota besar. Bahkan tidak tampil sebagai *modern office*, kantor modern simbol modernitas yang formal.



Istimewa

Ruang kerja Ketua Umum



Istimewa

Meja depan kantor ISEI



Istimewa



Istimewa

■ Dinding lukisan para pemimpin ISEI dari waktu ke waktu

Linimasa Kepemimpinan



Sumitro Djojohadikusumo

Perintis dan pelopor ilmu ekonomi pembangunan

1955–1957



Muljatno Sindhudarmoko

Mengukuhkan identitas organisasi

1964–1966



Emil Salim

Menegakkan Ekonomi Rasional

1972–1979



J. B. Sumarlin

Inklusif dan kontributif.

1987–1993



Sarbini Sumawinata

Menjaga independensi organisasi.



Mohammad Sadli

Membangun kolaborasi.



Arifin Siregar

Responsif dan adaptif

1979–1987



Bambang Sudibyo
*Meningkatkan kapabilitas
organisasi*



Darmin Nasution
*Menyeimbangkan
antarsektor*



Perry Warjiyo
*Menjawab tantangan
zaman*

1993–2000

2000–2003

2003–2009

2009–2015

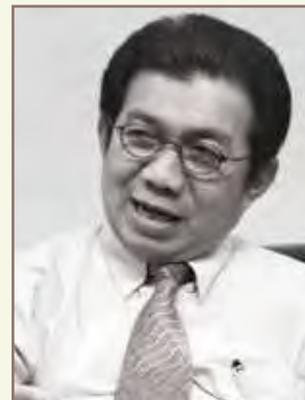
2015–2018

2018–2027

Marzuki Usman
Relasi pusat-daerah

Burhanuddin Abdullah
Mengakomodasi keberagaman

Muliaman Hadad
Membuka luas ruang wacana



RUJUKAN

- Arndt, H. W., *Pembangunan Ekonomi: Sejarah Pemikiran* (terj. Fahzenil), Cet. I. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Boediono, *Ekonomi Indonesia dalam Lintasan Sejarah*, Cet. IV. Bandung: Mizan Pustaka, 2010.
- Buitenweg, Hein, *Java: droom en herinnering*. Den Haag: Servire, 1959.
- Dahlan, Vidya dan Lukman Hakim, *ISEI: The First 50 Years*. Tangerang/Jakarta: Duta Pratama/Lembaga Penerbitan FEUI, 2005.
- Dhakidae, Daniel, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara Orde Baru*. Jakarta: Gra-media, 2003.
- Djojohadikusumo, Sumitro, *Indonesia dalam Perkembangan Dunia: Kini dan Masa Datang*, Cet. III. Jakarta, LP3ES, 1977.
- *Kredit Rakyat di Masa Depresi* (terj. Hasan Basari), Cet. I. Jakarta: LP3ES, 1989.
- Esmara, Hendra (pnyt), *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan: Kumpulan Esei untuk Menghormati Sumitro Djojohadikusumo*. Jakarta: Gramedia, 1987.
- Feith, Herbert, *The Decline Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1970.
- Mallarangeng, Rizal, *Mendobrak Sentralisme Ekonomi: Indonesia 1986–1992*, Cet. III. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2008.
- Muhaimin, Yahya A., *Bisnis dan Politik: Kebijakan Ekonomi Indonesia 1950–1980*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Poeze, Harry A., *In het land van de overheerser: Indonesiërs in Nederland 1600–1950*. Leiden: Koninklijk Instituut Taal-, Land- en Volkenkunde, 1987.
- Setiawan, Agus, *Kelampauan, Kekinian dan Hari Depan: Sumbangan Gagasan Sarjana Ekonomi Indonesia*. Jakarta: Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia [dalam proses penerbitan].

Memperingati tujuh dekade Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia, buku **Membangun Ekonomi Negeri: 70 Tahun ISEI** menjadi mozaik cerita organisasi ini mengawal arah ekonomi bangsa. Sejak didirikan pada 1955 oleh para ekonom perintis, ISEI telah menjadi rumah besar bagi para akademisi, peneliti, dan praktisi ekonomi Indonesia.

Bergaya *coffee table book*, karya ini menyajikan perjalanan historis dengan paduan narasi dan visual yang merekam momen-momen penting dalam sejarah ISEI, serta mengeksplorasi kontribusinya dalam berbagai kebijakan ekonomi yang berdampak luas. Setiap bab mengulas peran dan inisiatif ISEI dalam merespons perubahan nasional dan global serta upayanya mendorong sinergi akademisi, pemerintah, dan sektor usaha.

Buku ini juga menyoroti aneka gagasan bernas yang berkembang dalam kongres, sidang pleno, dan forum diskusi ISEI yang memperkaya perumusan kebijakan ekonomi Indonesia. Dari komitmen mendalam para ekonom hingga dedikasi ISEI dalam wacana kemajuan ekonomi Indonesia, buku ini menjadi potret kolektif atas perjalanan organisasi yang terus berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat dan ekonomi bangsa secara berkelanjutan.



Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
Jalan Daksa IV/9,
Jakarta www.isei.or.id